

**EVALUASI BUMDes DALAM PENGELOLAAN USAHA  
EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM ( UED-SP )AL-  
MUKAMMIL DESA PUTERI SEMBILAN  
KECAMATAN RUPAT UTARA  
KABUPATAEN BENGKALIS**

Oleh :

**WAHYUDI  
NPM197321038**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat**

**Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ( S.2 ) ILMU  
PEMERINTAHAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

LEMBAR PERGESAHAN

Nama : WAHYUDI  
NPM : 197321038  
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Pemerintahan  
Kekhususan :-  
Judul Tesis : Evaluasi BUMdes Dalam Pengelolaan Usaha Ekonomi  
Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Al-Mukamil Desa Puteri  
Sembilan Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis.

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjan, Program  
Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Jum'at  
Tanggal : 5 Februari 2021  
Pukul : 9.30 s/d 10.30 WIB

**Dan dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS**

KETUA

**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**

SEKRETARIS

**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A**

Anggota I

**Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si**

Anggota II

**Dr. Ranggi Ade Febrian, SIP, M.Si**

**Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau**

**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**

**LEMBARAN PENGESAHAN TESIS**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**EVALUASI BUMDES DALAM PENGELOLAAN UED-SP  
AL-MUKAMMIL DESA PUTERI SEMBILAN KECAMATAN RUPAT  
UTARA KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh :  
Nama : WAHYUDI  
NPM : 197321038  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk ujian .

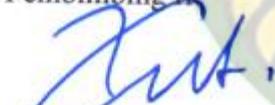
Pembimbing I

Tanggal 25.01.21

  
Prof Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Tanggal 23-01-2021

  
Dr. Ahmad Fitra Yuzar, S.IP., M.A

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau,

  
Dr. Ahmad Fitra Yuzar, S.IP., M.A



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 279/KPTS/PPs-UIR/2020

### TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **WAHYUDI**  
 N P M : **197321038**  
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**  
 Judul Tesis : **"EVALUASI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGELOLAAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) AL-MUKMMIL DI DESA PUTERI SEMBILAN KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS"**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 29 Juni 2020

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.  
 NIP. 195408081987011002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUDI  
NPM : 197321038  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : "Evaluasi BUMdes Dalam Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP) Al- Mukamil Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.

Dengan ini menyatakan :

1. \_\_\_\_\_ Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. \_\_\_\_\_ Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. \_\_\_\_\_ Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. \_\_\_\_\_ Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 25 Januari 2021  
Yang Membuat Pernyataan,



WAHYUDI



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 017/A-UIR/5- PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **WAHYUDI**  
NPM : **197321038**  
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 25 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui  
Ketua Prodi, Magister Ilmu Pemerintahan

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 25 Januari 2021  
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *Syafitri\_ind05*

# Turnitin Originality Report

Processed on: 25-Jan-2021 13:29 +08

ID: 1493792680

Word Count: 20951

Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
<b>28%</b>	Internet Sources: 30% Publications: 7% Student Papers: 12%

EVALUASI BUMDes DALAM  
PENGELOLAAN USAHA  
EKONOMI DESA SIMPAN  
PINJAM ( UED-SP )AL-

MUKAMMIL DESA PUTERI  
SEMBILAN KECAMATAN RUPAT  
UTARA KABUPATEN

BENGKALIS By **Wahyudi**  
**Wahyudi**

4% match (Internet from 14-Dec-2020)  
<https://arinugrohosusanto.wordpress.com/>

3% match (Internet from 13-May-2019)  
<https://adoc.tips/bab-ii-tinjauan-pustaka-dicapainya-keberhasilan-dalam-mencap9ae0aa3406fe0196ba7fd843cb8c73b446848.html>

3% match (Internet from 10-Apr-2018)  
<http://digilib.unila.ac.id/3340/15/BAB%20II.pdf>

2% match (Internet from 09-Jul-2020)  
<https://id.123dok.com/document/nzw1d61q-analisis-penerapan-prinsip-prinsip-pengelolaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-wirakarya-di-desa-trimodadi-kecamatan-abung-selatan-kabupaten-lampung-utara-analysis-on-implementation-of-management-principles-by-wirakarya-village-enterprises-at-trimodadi-v.html>

2% match ()  
<https://www.neliti.com/publications/31736/pengelolaan-usaha-ekonomi-desakelurahan-simpan-pinjam-uedk-sp-di-desa-gabung-mak>

2% match (Internet from 24-Jul-2020)  
<http://repository.uir.ac.id/1672/1/edit.pdf>

2% match (Internet from 11-Apr-2018)  
<http://digilib.unila.ac.id/4492/15/BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 13-Nov-2012)  
<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/456/jbptunikompp-gdl-iiphimawan-22764-7-babii.pdf>

1% match (Internet from 28-May-2020)  
<https://www.scribd.com/document/318804292/BPHTB>

1% match (Internet from 31-Dec-2018)  
<http://digilib.unila.ac.id/54993/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

1% match (Internet from 24-Sep-2019)  
<http://repository.uin-suska.ac.id/5225/3/BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 16-Nov-2020)

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, Ayahanda Alm. BURHANUDDIN dan Ibunda AWIYAH yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat Hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Tesis yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap Hamba Allah yang telah ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini. Kupersembahkan Tesis ini kepada : Kedua Orang Tua Tercinta,

Istri tercinta Dahlena, dan anak tersayang Akbar dan Rayen yang selalu mendukung dan mensupport serta keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung membantu secara moril dan materi dan menjadi motivasi yang sangat dibanggakan. Terimakasih atas semua jasa dan kasih sayangnya semoga Allah Azza Wajalla selalu menjaga dan memberikan Hidayah Nya Kepada kita Semua.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA LENGKAP : WAHYUDI
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : KADOR, 27 MEI 1983
3. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA  
AYAH : Alm. BURHANUDDIN  
IBU : AWIYAH
6. ALAMAT : JL. TENGGU IBRAHIM RUPAT UTARA
7. TELEPON/HP : 0852 7877 6679
8. EMAIL : wahyudi27@gmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN  
SD : 1996 ( SD NEGERI 032 KADOR)  
SMP : 1999 ( SMPN 2 PKL NYERIH )  
SMA : 2002 ( SMA KURNIA JAYA PKL NYERIH )  
S-1 : 2010 ( UNIVERSITAS LANCANG KUNING)
10. RIWAYAT PEKERJAAN :  
TAHUN 2002-2008 : Pegawai Honorer Kantor Camat  
TAHUN 2009-Sekarang : Pegawai Staf Satpol PP di Kecamatan Rupas  
Utara Kabupaten Bengkalis

Pekanbaru, 25 JANUARI 2021

WAHYUDI

## LEMBAR TUNJUK AJAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Annisa-59)

EVALUSI BUMDes DALAM PENGELOLAAN USAHA EKONOMI DESA  
SIMPAN PINJAM ( UED- SP ) AL-MUKAMIL DESA PUTERI SEMBILAN  
KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

WAHYUDI

Fenomena penelitian dilapangan diantaranya masih banyaknya ditemukan angka penunggakan yang tinggi di Usaha Ekonomi Simpan pinjam ( UED-SP ) dan beberapa kendala Evaluasi BUMdes dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis. Permasalahan yang terjadi seperti mekanisme Evaluasi yang sulit dipahami oleh masyarakat didalam Usaha Ekonomi Simpan pinjam ( UED-SP ), yaitu angka tunggakan yang tinggi dan adanya kemacetan dalam pengembalian perguliran pinjaman, dalam konteks Evaluasi BUMdes yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan.tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi Evaluasi BUMdes dalam pengelolaa ( UED-SP ) serta faktor-faktor penghambat dan pendukung Evaluasi didalam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis.

Faktor penghambat dalam proses Evaluasi BUMDes dalam pengelolaan ( UED-SP dapat ditinjau melalui teori William N Dunn diantaranya: Efektifitas, effisiensi,kecukupan , pemerataan ,Responsivitas,ketepatan. Adapun dalam Penelitian ini penulis memakai metode kualitatif,,metode ini informasi yang dapatkan melalui informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian diantara Kades,BUMDes,Pendamping Desa, BPD, tokoh masyarakat dan pemanfaat Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dalam melakukan pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan dan teknologi informasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Evaluasi BUMDes dalam pengelolaan (UED-SP) Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan **Kurang Berhasil**. Ini disebabkan ketidak mampuan pegelolaan Usaha ekonomi simpan pinjam ( UED-SP ) sehingga di ( UED-SP ) ditemukan angka penunggakan yang tinggi serta rendahnya tingkat perguliran pengembalian pemanfaat,dan adapun tujuan dari pembentukan BUMdes tidak tercapai yaitu untuk mendapatkan PAdes berdasarka potensi desa , hal tersebut disebabkan turunnya harga karet.dan sawet.Berdasarkan hasil dari temuan, disarankan kepada BUMdes dan UED-SP untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kualitas Pengelola dalam hal pembinaan, pengawasan dan penegakan disiplin dan sanksi kepada pemanfaat, sehingga dana pinjam dari ( UED-SP ) bisa digulirkan ,dan dapat dirasakan masyarakat desa, ini supaya diberi kesempatan lagi untuk masyarakat mendapatkan pinjaman dari ( UED-SP ).

Kata Kunci : Evaluasi, Efektifitas, effisiensi, kecukupan, pemerataan ,Responsivitas ,ketepatan.

EVALUSION BUMDes IN THE MANAGEMENT OF ECONOMIC  
BUSINESSES IN THE SIMPAN PINJAM VILLAGE AL-MUKAMIL PUTERI  
SEMBILAN KECAMATAN RUPAT UTARA, BENGKALIS DISTRICT

ABSTRACT

WAHYUDI

(UED-SP) phenomena of research in the field include the large number of arrears that are still found in savings and loans. Evaluation constraints of BUMDes in the management of Village Economic Business Savings and Loans (UED-SP) in Puteri Sembilan Village, Rupert Utara District, Bengkalis Regency. Problems that occur are such as the evaluation mechanism that is difficult for the community to understand in the Economic Savings and Loans (UED-SP), namely high arrears and congestion in repaying loan revolutions, in the context of BUMDes Evaluation which aims to reduce poverty rates. to analyze and identify BUMDes Evaluation in management (UED-SP) as well as inhibiting and supporting factors for evaluation in the Village Economic Business Savings and Loans (UED-SP) in Puteri Sembilan Village, Rupert Utara District, Bengkalis Regency.

Inhibiting factors in the BUMDes evaluation process in management (UED-SP) can be reviewed through William N Dunn's theory, including: Effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, accuracy. In this study the authors used a qualitative method, this method is information obtained through informants. As for those who became informants in research among the Head of Village, BUMDes, Village Facilitators, BPD, community leaders and users of the Savings and Loan Village Economic Business (UED-SP). In collecting data, the methods of observation, interviews, literature study and information technology were used. collected then analyzed using qualitative descriptive analysis The results of the study found that the evaluation of BUMDes in the management (UED-SP) of the Village of Puteri Sembilan, Rupert Utara District, Bengkalis Regency as a whole was **less successful**. This is due to the inability to manage the economic savings and loans (UED-SP) business. at (UED-SP) found the arrears figures high and low rates of return of beneficiaries, and the objective of establishing BUMDes is not achieved, namely to obtain PAdes based on village potential, this is due to lower prices for rubber and sawet. Based on the results of the findings, it is suggested to BUMDes and UED-SP to further improve their capabilities. and the quality of the management in terms of guidance, supervision and enforcement of discipline and sanctions to users, so that borrowed funds from (UED-SP) can be rolled out, and can be felt by the village community, so that they will be given another opportunity to get loans from (UED-SP)

Keywords: Evaluation, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “ **Evaluasi BUMDesa dalam pegelelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Desa Puteri Sembilan kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis**”. Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materi guna menyelesaikan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof.Dr. H.Yusri Munaf,S.H,M.Hum Sebagai Direktur Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.H. Rahyunir Rauf, M.Si Sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuzar, S.IP,M.Si selaku Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H.Yusri Munaf, S.H, M.Hum Sebagai Pembimbing I dan Dr.Ahmad Fitra Yuzar,S.IP,M.Si Sebagai Pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Tesis.
5. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Tesis ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha

Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Tesis.

6. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Januari 2021

Wahyudi

## DAFTAR ISI

Lembaran Persetujuan Pembimbing .....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar .....	xi
Daftar Isi.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Perumusan Masalah .....	12
1.4 Batas Masalah .....	12
1.5 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>14</b>
2.1 Konsep Teoritis.....	14
2.1.1. Konsep Pemerintahan .....	14
2.1.2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	18
2.1.3. Konsep Pemerintahan Desa .....	22
2.1.4. Konsep Evaluasi .....	25
2.1. 5. Konsep Program .....	29
2.1.6. Konsep Evaluasi Program.....	31
2.1.7.Konsep BUMDes.....	35
2.1.8. Konsep Pengelolaan.....	38
2.2 Ulasan Karya .....	41
2.3 Kerangka Pemikiran.....	42
2.4 Konsep Operasional .....	44
2.5 Operasional Variabel.....	45
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
3.1 Objek Penelitian.....	47
3.2 Metode Penelitian.....	46
3.3 Lokasi Penelitian.....	48

3.4	Inforumen Penelitian.....	48
3.5	Teknik pemetukan Informen.....	49
3.6	Jenis dan Sumber Data.....	52
3.7	Teknik Pengambilan Data.....	52
3.8	Teknik Analisis Data.....	53
3.9	Sistematika Penulisan.....	55
3.10.	Rencana Jadwal Penelitian.....	56
BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....		57
4.1	Identitas Responden .....	57
4.1.1	Identitas responden berdasarkan Usia .....	57
4.1.2	Identitas responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	58
4.1.3	Identitas responden berdasarkan pendidikan .....	59
4.1.4	Kondisi Geografis Kecamatan Rupert Utara .....	60
4.1.5	Kondisi Aparatur Kecamatan Rupert Utara .....	63
4.1.6	Kondisi Penduduk Kecamatan Rupert Utara .....	64
4.1.7	Profil Desa Puteri Sembilan .....	65
4.1.8	Keadaan Georafis .....	66
4.1.9	Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Al-Hisan .....	69
4.1.10	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pnjam (UED-SP) Al- Mukamil .....	73
4.1.11	Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program .....	75
4.2	Evaluasi BUMdes Dalam Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis .....	92
1.	Efektifitas .....	93
2.	Efesiensi .....	99
3.	Kecukupan .....	105
4.	Pemerataan .....	108
5.	Responsifitas .....	118
6.	Ketepatan .....	119

4.3 Hambatan-Hambatan dalam Evaluasi BUMdes dalam pengelolaan UED-SP  
Al-Mukamil Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten  
Bengkalis ..... 125

BAB V : PENUTUP DAN SARAN ..... 127

A. Kesimpulan ..... 127

B. Saran ..... 128

**DAFTAR PUSTAKA ..... 128**

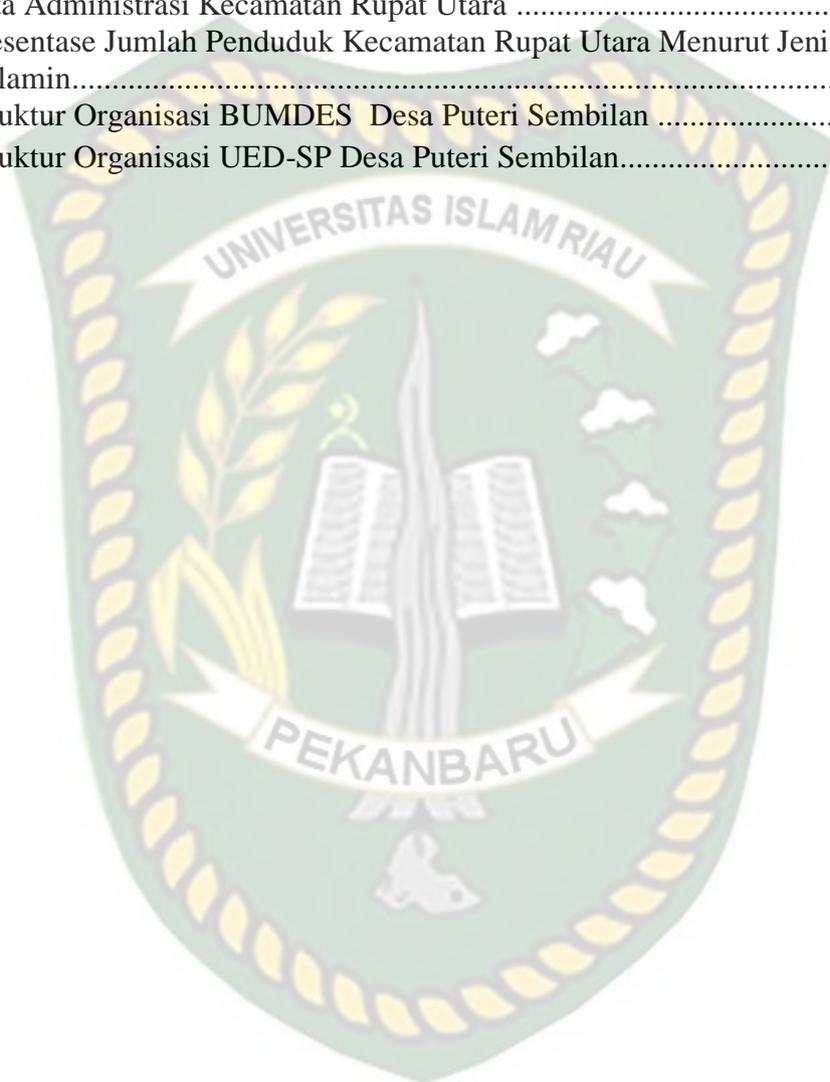


## DAFTAR TABEL

1.1	Modal Awal BUMDes Al Ihsan.....	9
1.2	Data Laba/Rugi UED-SP Al-Mukamil Desa Puteri Sembilan.....	9
1.3	Jumlah Penunggak UED-SP Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara Tahun 2020.....	10
1.4	Jumlah Peminjam pada UED-SP Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara Tahun 2020.....	11
2.1	Operasional Variabel .....	46
3.1	Informan Penelitian .....	49
3.2	Informan Penelitian .....	52
3.3	Jadwal Penelitian .....	56
4.1	Usia Responden .....	58
4.2	Jenis Kelamin Responden .....	59
4.3	Pendidikan Responden .....	60
4.4	Luas Wilayah Kecamatan Rupert Utara .....	62
4.5	Suku yang tinggal di Kecamatan Rupert Utara .....	63
4.6	Jumlah Perangkat Desa Menurut Desa dan Jenis Kelamin Tahun 2020..	64
4.7	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Puteri Sembilan Tahun 2020 .....	67
4.8	Keadaan Penduduk Menurut Agama .....	68
4.9	Mata Pencarian Masyarakat Desa Puteri Sembilan Tahun 2020.....	69
4.10	Modal Awal BUMDes Al-Ihsan.....	73
4.11	Pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Puteri Sembilan.....	78

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran .....	42
3.1 Teknik Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Hubberman .....	53
4.2 Peta Administrasi Kecamatan Rupert Utara .....	60
4.3 Presentase Jumlah Penduduk Kecamatan Rupert Utara Menurut Jenis Kelamin.....	64
4.4 Struktur Organisasi BUMDES Desa Puteri Sembilan .....	70
4.5 Struktur Organisasi UED-SP Desa Puteri Sembilan.....	76



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Lantar Belakang

Organisasi Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah daerah tersebut, wilayah daerah yang mempunyai kekuasaan serta lembaga yang mengurus masalah negaraan dan kemakmuran, kesejahteraan rakyat di wilayah daerahpemerintahan. pemberdayaan masyarakat yang mengemukakan sebagai sentral pembangunan dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan social di daerah-daerah yang belum bisa di selesaikan dengan baik terutama antara masyarakat didaerah perdesaan, kawasan desa terpencil, dan desa terbelakang, Pada hal pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah perkotaan terus meningkat meninggalkan pertumbuhan perekonomian di daerah wilayah perdesaan.

Di perdesaan Pemberdayaan yang baik ialah harus dimelihat dari esensi permasalahan sebenarnya yang dialami oleh masyarakat perdesaan pertumbuhan ekonomi di daerah, apa yang sebenarnya dibutuhkan, dan bagaimana mengatasinya ini harus benar dilakukan secara matang dan teliti agar proses pemberdayaan dapat berjalan secara baik dan optimal. Indonesia saat ini untuk mengatasi terhadap pengentasan perekonomian di daerah perdesaan dan daerah terpencil hal tersebut sudah dimulai waktu pemerintahan Indonesia merdeka. Penanggulangan pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu tujuan utama Negara Indonesia Saat ini yang terpenting negara yang harus dipenuhi, sekaligus sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai Negara.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia maupun di wilayah daerah seakan tidak pernah habisnya dibahas dan diperhatikan pada pemerintah pada saat ini, banyak pihak membicarakan tentang kemiskinan, karena kemiskinan merupakan permasalahan besar dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. pemerintah perhatian sangat serius di tujukan pada keluarga miskin terlihat dari kebijakan yang dilakukan pemerintah yang sasarannya adalah keluarga miskin. Namun, kebijakan yang dibuat justru seringkali tidak tepat sasaran yang di inginkan. Kemiskinan merupakan permasalahan Besar yang harus dituntas karena keadaan Tersebut membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa tidak akan berubah status di mata dunia.

Fenomena kemiskinan ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan yaitu kekayaan sumber daya alam Riau yang berlimpah, berupa migas dari hasi buminya lainnya khususnya pada wilayah Kabupaten Bengkalis, adalah Kabupaten yang terkaya Indonesia mengindikasikan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bengkalis bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan kemiskinan struktural yang multidimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidak mampuan masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, pembangunan dan politik.

Di antaranya Pembangunan Desa, Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Pedesaan (*Rural Development*), Pembangunan Pedesaan Terpadu (*Integrated Rural Development*), Pembangunan Masyarakat (*Comunity Development, CD*) atau apapun sebutannya di daerah wailayah Indonesia, sebagai suatu program pembangunan, bermula dari, digerakkan oleh, dan ditujukan

kepada masyarakat sebagai sosial sistem, yang di Indonesia sangat dominan, dan berdasarkan kehendak untuk menjadi persatuan antara masyarakat di daerah kearah nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan otonomi dan wewenang kepada masyarakat Desa untuk memilih Kepala Desa, Parlemen Desa, dan Usaha Desa. Dasar pemberian otonomi Desa dapat diartikan sebagai penyerahan kembali kewenangan mengurus desa kepada masyarakatnya atau lebih dikenal istilah otonomi. Di lihat dari sudut ekonomi nasional saat ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ada pun upaya-upaya Pemerintah Daerah mengemban fungsi memberdayakan masyarakat di daerah. Hal tersebut sejalan dengan 4 (empat) fungsi pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Rasyid dalam Labolo yaitu:

1. Fungsi pengaturan;
2. Fungsi pelayanan;
3. Fungsi pemberdayaan; dan
4. Fungsi pembangunan.

Program Pemerdayaan Desa juga tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 yang kemudian diganti dengan Peraturan Gubernur Riau Tahun Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau. PPD adalah program yang ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, penyediaan Dana Usaha Desa dan penguatan koordinasi serta sinergi

sektoral dalam pembangunan desa secara partisipatif. Seiring jalannya waktu dalam perintah di desa.

Pemerintah provinsi dipimpin Gubernur, Gubernur adalah seorang kepala wilayah sekaligus merangkap kepala pemerintahan di daerah provinsi dan daerah. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Bupati/Wali Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan, wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari daerah daratan Sumatera dan kepulauan yaitu pulau Bengkalis dan pulau Rupat dimana jumlah desa yang ada di Kabupaten Bengkalis sebanyak 156 Desa dan Kelurahan.

Desa adalah pemerintah yang terendah di Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Desa adalah Desa mempunyai wewenang untuk bisa mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri, Desa adalah Pemerintahan terkecil yang berada dibawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan kata lain Desa adalah pemerintahan diujung tombak, pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis memekarkan sebanyak 56 Desa diantaranya kecamatan Rupat Utara adalah Desa Suka Damai, Desa Hutan Ayu dan Desa Puteri Sembilan. pada tahun 2015.

Desa Puteri Sembilan adalah Desa pemekaran dari Desa Kadur dengan luas Desa Puteri Sembilan 62 Km jumlah penduduk 1672 jiwa. Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “ desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Sesuai instruksi pemerintah bahwa pemerintah desa harus membentuk Organisasi Badan usaha milik desa (BUMdes) Yang fungsi adalah memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi

desa. Badan usaha milik desa (BUMDes) menurut undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Ada pun modal awal Bagi BUMDes yang menjadi pendapatan pokok adalah bersumber dari APBD di antara nya bantuan dari pemerintah Kabupaten di salurka melalui mekanisme APBD Des, juga peraturan menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor : 4 Tahun 2015 tentang pendirian , pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan Usahan Milik Desa dan berdasarkan hasil musawarah Desa Puteri Sembilan yang di laksanakan pada tanggal 14 Desember 2015, Peraturan Desa Puteri Sembilan Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 213 ayat (1) di sebutkan bahwa “ desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Badan usaha milik desa (BUMdes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2015 Pasal 2 “ pendirian BUMDes dimaksudkan Sebagai Upaya menampung seluruh kegiatan di bidang Ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang di kelola oleh desa dan /atau kerja sama antara Desa.

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) merupakan lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memeperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi didesa yang berpungsi sebagai lembaga social ( *Sosial institution* ) dan komersial ( *Commercial institution* ). Selain itu BUMDes juga berperan Sebagai Lembaga Sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dan menyediakan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local kepasar<sup>1</sup>.

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor .39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes di artikan Sebagai mana yang berbunyi :

Badan Usah Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ di dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat<sup>2</sup>.

Program pembangunan Masyarakat Desa dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bidang usaha yang di jalankan berdasarkan pada potensi desa. Keuntungan yang di peroleh di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, Operasionalisasinya di control secara bersama oleh BPD.

<sup>1</sup> Depertemen *pendidikan nasional pusat kajian dinamika system bembangunan ( PKDSP ).2007*  
Hal 3

<sup>2</sup> Pasal 213 ayat ( 1 ) UU No.32 2004 jo.UU No.23 2014 Tentang Pemerinatah Daerah

Salah satu syarat berdirinya BUMDes adalah adanya UED-SP yang sehat. Sementara dalam program simpan pinjamnya hanya mencapai sekitar 50%. Direktur BUMDes Artinya tujuan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan peningkatan pendapatan asli desa (PADes) belum tercapai.

Tujuan Medirikan BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Ada pun modal awal Bagi BUMDes yang menjadi pendapatan pokok bersumber dari Dana Desa.

Berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian ,pengurusan ,pengelolaan dan pemubaran Badan Usaha Milik Desa Dan berdasarkan hasil Musyawarah Desa puteri Sembilan yang di laksanakan pada tanggal 14 Desember 2015,dalam Rangka meningkatkan perekonomian dan mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerintah Desa perlu di bentuk suatu Badan Usaha Milik Desa, dari hasil Musyawarah desa puteri Sembilan yang di laksanakan pada tanggal 14 Desember 2015 bertempat Jl. Pahlawan Puteri Sembilan di sepakati untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Desa puteri Sembilan yang berkedudukan di desa puteri Sembilan, berdasarkan Musyawarah Desa sepakat memberikan nama Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) tersebut adalah Al-Ihsan.

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Desa Nomor: 3 Tahun 2015 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes Al-Ihsan Menjalankan 9 ( Sembilan ) Bidang Usaha. Unit-unit Usaha BUMDes Al-Ihsan yang telah di bentuk dan dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai berikut:

1. Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
2. Unit Usaha perdagangang
3. Unit Usaha Penyewaan Barang
4. Unit Usaha Air Minum Desa
5. Unit Usaha Rumah Tangga
6. Unit Usaha Desa Wisata
7. Unit Usaha Nelayan
8. Unit Usaha Pertanian
9. Unit Usaha Pasar Desa

Dari 9 ( Sembilan ) Unit Usaha yang telah di bentuk hanya 5 ( Lima ) yang baru dijalankan oleh BUMDes Al-Ihsan hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam pengelolaan Unit usaha yang telah di bentuk Belum terlaksana dengan Maxsimal, Saat ini BUMDes Hanya mampu menjalankan Sebanyak 3 ( Tiga ) Unit Usaha Sebagai berikut :

1. Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
2. Unit Usaha perdagangang ( Gas Elpiji dan Rumah Makan )
3. Unit Usaha Penyewaan Barang ( Mobil Anggkutan dan Sound sistem)

Dalam menjalankan Unit Usaha yang telah di tetapkan BUMDes Al-Ihsan, mendapat modal awal dari peryertaan modal dari pemerintah Desa yang bersumber dari Hibah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan APBDes Desa Puteri Sembilan Seabagai berikut :

Tabel 1.1 Modal Awal BUMDes Al-Ihsan

No	Bidang Usaha	Unit Usaha	Jumlah Modal	Sumber Dana
1.	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam		Rp. 1.000.000.000	Hibah pemda Kab. Bengkalis tahu 2015
2.	Usaha perdagangan	Gas Elpiji	Rp. 141.000.000	DD Tahun 2019
		Rumah Makan	Rp. 55.000.000	DD Tahun 2018
3.	Usaha Penyewaan Barang	Mobil Anggkutan	Rp. 100.000.000	DD Tahun 2019
		Sound system	Rp. 45.000.000	DD Tahun 2018
Jumlah Total			Rp.1.341.000.000	

Sumber :Sekretariat BUMDES

Berdasarkan praobservasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini belum mencapai target secara maksimal, artinya tujuan BUMDes supaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) belum tercapai. Di antaranya Penungakana pada pemanfaat dan Beberapa program pada BUMDes belum dapat berjalan secara maksiamal, dan bahkan ada dari beberapa program yang belum terlaksana.

Tabel 1.2. Data Laba/Rugi UED-SP Al-Mukamil Desa Puteri Sembilan

No	Jenis Usaha	Modal Awal ( Rp )	Laba / Rugi Tahun ( Rp )		
			2017	2018	2019
1	Simpan Pinjam	1.000.000.000	.-23.712.122	-12.784.000	-5.224.237
2	Usaha perdagangan LPG	141.000.000	-	-	-
3	Rumah Makan	55.000.000	-	-	-
4	Mobil angkutan	100.000.000	-	-	-
5	Sound system	45.000.000	-	-	-

Sumber : Kantor UED-SP Puteri Sembilan 2020

Berdasarkan hasil data yang penulis dapat ada beberapa fenomena yang terjadi pada Bidang Usaha BUMDes Al-Ihsan Desa Puteri Sembilan antara Fenomena yang terjadi yaitu :

1. Permasalahan dalam Unit Usaha UED-SP Desa Puteri Sembilan yaitu Angka tunggakan pemanfaat yang tinggi

Dapat dilihat dari Tabel .1.3

**Tabel 1.3 : Jumlah Penunggak UED-SP Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Tahun 2020**

Tahun	UED-SP	Peminjam yang menunggak	Total Tunggakan	Pinjaman Berdasarkan Jenis Usaha
2017	Puteri Sembilan	75	2.77.001.778	Pedagangan : 11 Perkebunan : 106 Perternakan : 1 Nelayan : 16 Jasa : 2 Pertanian : 0 Industeri : 1
2018	Puteri Sembilan	102	4.92.415.556	Pedagangan : 13 Perkebunan : 12 Perternakan : 1 Nelayan : 18 Jasa : 2 Pertanian : 0 Industeri : 2
2019	Puteri Sembilan	122	1.225.507.260	Pedagangan : 16 Perkebunan : 154 Perternakan : 1 Nelayan : 21 Jasa : 2 Pertanian : 0 Industeri : 1

Sumber : UED-SP Desa Puteri Sembilan 2020

Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa yang banyak terjadinya tunggakan dari tahun 2017 sebanyak 75 orang dan pada usaha Perkebunan, dan 106 dan pada

tahun 2018 terjadi penungakan sebanyak 102 orang dibidang usaha perkebunan,dan pada tahun 2019 penungakan sebanyak 122 orang hal ini dikarenakan Harga karet akhir-akhir ini terjadi penurunan Harga.

**Tabel 1.4 : Jumlah Peminjam pada UED-SP Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rukat Utara Tahun 2020**

Tahun	UED-SP	Pemanfaat UED- SP	Total Pinjaman	Pinjaman berdasarkan jenis Usaha
2017	Puteri Sembilan	136	2.098.780.000	Perdagangan :11 Perkebunan :106 Peternakan : 1 Nelayan : 16 Jasa : 2 Pertanian :0 Industri : 1
2018	Puteri Sembilan	155	2.392.210.000	Perdagangan :13 Perkebunan :120 Peternakan : 1 Nelayan : 18 Jasa : 2 Pertanian :0 Industri : 1
2019	Puteri Sembilan	193	2.483.000.000	Perdagangan :16 Perkebunan :154 Peternakan : 1 Nelayan : 21 Jasa : 2 Pertanian :0 Industri : 1

Sumber : Kantor UED-SP Puteri Sembilan 2020

Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Pemanfaat dibidang Perkebunan dari tahun 2017 s /d tahun 2019 yang banyak melakukan Peminjaman di UED-SP,adalah di bidang Perkebunan.

Berdasarkan dari latarbelakang di atas, Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Bumdes Dalam Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rukat Utara “**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi berapa masalah diantaranya adalah :

1. Belum terlaksannya semua Unit Usaha BUMDes Al-Ihsan yang telah ditetapkan.
2. Banyak jumlah tunggakan dari pemanfaat pada Unit Usaha UED-SP, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan PADes kurang maksimal.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penelitian ini di dapat dirumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengelolaan BUMDes Al-Ihsan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( PADes ) dan meningkatkan kemandirian masyarakat serta memperkuat Ekonomi Desa?.

## 1.4. Batasan masalah

Berdasarkan rumusan dan identifikasi masalah yang dikemukakan, dapat diketahui bahwa masalah-masalah penelitian ini sangat luas. Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta untuk membuat penelitian lebih terarah, maka masalah yang dikaji dibatasi pada Evaluasi BUMDes Al-Ihsan dalam pengelolaan UED-SP di Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat utara Kabupaten Bengkalis.

## 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisis BUMdes dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Puteri Sembilan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan memberikan Kontribusi dan informasi pada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Masukan kepada pengelola BUMDes dalam rangka mendapatkan Pendapatan Asli Desa PADes.
- c. Secara Umum dapat sebagai bahan Informasi dan untuk Mengetahui lebih mendalam tentang evaluasi BUMDes dalam pengelolaan UED-SP di Desa.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Konsep Teoritis

Pembahasan ini mengkajian kepustakaan acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip dan teori yang digunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah. Sehingga masalah yang dihadapi bisa teratasi secepatnya. dengan hal tersebut sehingga pemerintah selalu serba salah dalam mengambil keputusan. Kebijakan yang diambil terkadang membantu pemerintah dan masyarakat terkadang kebijakan tersebut bertolak belakang apa yang di inginkan .

*Amirin* memaparkan bahwa kajian pustaka digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan diangkat menjadi sebuah topic penelitian serta untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas. Konstruksi teoritik yang ada dalam kajian kepustakaan merupakan pola untuk mengarahkan peneliti dalam membentuk kategori substantif<sup>3</sup>.

##### 2.1.1 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dalam paradig lama memiliki Objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, Namun dalam Paradigma baru pemerintahan di pandang memiliki Objek Materialnya Masyarakat, sehingga pemerintahan di maknani sebagai suatu Proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan / Negara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Amirin, Tatang M. 2000, *Menyusun rencana penelitaian*, Jakarta; Raja Grapindo Persada

<sup>4</sup> Munaf Yusri 2016 . *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru Marpoyan Tujuh hal.47

Berdasarkan Teori Pemerintahan dapat diartikan sebagai *government* dan bisa juga diartikan pemerintahan<sup>5</sup>. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan rohani dan jasmaniah yang sebesar- besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah<sup>6</sup>.

Sedangkan menurut Rauf<sup>7</sup> Pengertian pemerintahan adalah merupakan suatu Organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan ( Tugas-Tugas) Negara pada suatu Negara dan di lengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa ahli yang mendefenisikan pemerintahan dan ilmu pemerintahan itu sebagai berikut :

1. Menurut *Rosenthal*<sup>8</sup> ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar dan proses pemerintahan umum.
2. Menurut *Wilson*<sup>9</sup> Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan

<sup>5</sup>Taliziduhu, Ndraha, *Kybernologi beberapa konsep Utama*, Sirao Credentia Center, Tangerang, Banten 2005, hal 142

<sup>6</sup> Ibit. Hal 166

<sup>7</sup> Rauf. *Asas penyelenggaraan pemerintahan Daerah* Zanafa Publishing. Nusamedia Yogyakarta, 2018 Hal .6

<sup>8</sup>Rosenthal dalam Inu Kencana syafei dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 7

<sup>9</sup> Wilson dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, *perbandingan pemerintah*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 8

maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan kelompok.

3. Menurut *Ndraha*<sup>10</sup> Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.
4. Menurut *Soemendar*<sup>11</sup> pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sekelompok tertentu yang menguasai atau mengurus Negara atau daerah sebagai bagian dari Negara secara baik dan benar yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep dari penyelenggaraan pemerintah bersifat dinamik, bergerak, berubah dinamikanya bergantung antara tiga sub kultur ( sub kultur ekonomi, Sub kultur kebudayaan dan sub kultur politik ), dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan kombinasi dari pengaturan

---

<sup>11</sup> Soemendar, dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, perbandingan Pemrintah , Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 10

berbagai bidang kehidupan terutama pengaturan dari aktifitas ekonomi, kebudayaan dan politik<sup>12</sup>.

Pemerintah pada dasarnya merupakan upaya pengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan secara bersama-sama Pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan, struktural, fungsional maupun tugas dan wewenangnya.

Pemerintah seharusnya bekerja menurut fungsi-fungsinya yang telah banyak dirumuskan oleh sarjana pemerintah seperti *Rosenbloom* atau *Goldsmith* yang lebih menegaskan pada fungsi Negara<sup>13</sup>. Sementara itu dari aspek manajemen, Pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintah.

*Rasyid* membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian yaitu pelayanan (*public service*) yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pembangunan (*development*) yang akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, pemberdayaan (*empowering*) yang akan mendorong kemandirian masyarakat dan pengaturan (*regulation*) yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas serta mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka dilihatlah pemerintahnya<sup>14</sup>. Artinya fungsi pemerintah itu sendiri, jika pemerintah dapat

<sup>12</sup>Taliziduhu, Ndraha, Kybernologi sebuah profesi, Sirao Credentia Center, tangkerang Banten, hal. 13

<sup>13</sup>Dalam Hamdi, Bunga Rampai Pemerintahan, Jakarta, Yasrif Watampone, 2002, hal 8- 11 dalam Mahadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan pengembangannya. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.hal 22

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Tujuan utama pemerintah adalah menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan dan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama<sup>15</sup>.

### 2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah menurut Rauf<sup>16</sup> adalah: 1). Penyelenggaraan urusan pemerintahan, 2). Diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dan DPRD, 3). Berdasarkan Asas otonomi Daerah dan tugas pembantu, 4). Dengan prinsip Otonomi yang seluas luasnya dalam prinsip dan system NKRI, 5). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>15</sup> Muhadam Labolo, memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu kajian, Teori, Konsep dan pengembangannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal. 25

<sup>16</sup> Ibid Hal .357

Menurut Makhya<sup>17</sup> pemerintah didefinisikan:

Secara etimologis, pemerintah (government) berasal dari bahasa Yunani, kubernan atau nahkoda kapal, artinya menatap ke depan. Sedangkan memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan.

Azas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) yaitu asas otonomi daerah yang terdiri atas :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di daerah.
- c. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

---

<sup>17</sup> Makhya, Syarief. 2004. Ilmu Pemerintahan: Telaahan Awal (Buku Ajar). Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hal 50

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sama halnya dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang meletakkan titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan kota dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya mempunyai tempatnya masing-masing. Istilah otonomi lebih cenderung pada political aspect, sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada administrative aspect. Namun jika dilihat dari konteks sharing of power, dalam prakteknya kedua istilah tersebut sulit atau bahkan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pertanyaan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah. Demikian pula sebaliknya.

Dilihat dari kekuasaan pemerintahan daerah otonom, pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok Bagir Manan<sup>18</sup>,

- a. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau administrasi Negara.
- b. Pemerintahan dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan daerah otonom.
- c. Pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua lingkungan jabatan Negara dibidang eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya.

---

<sup>18</sup> Ibet Hal 103

Solihin<sup>19</sup> mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

1. Manusia pelaksanaannya harus baik.

Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena manusia merupakan subyek utama dalam setiap aktivitas pemerintah dan merupakan pelaku dan penggerak mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaikbaiknya yaitu sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Keuangan harus cukup baik.

Faktor keuangan juga merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena hampir seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan biaya.

3. Peralatan harus baik

Peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk melancarkan pekerjaan atau kegiatan pemerintahan di daerah.

4. Organisasi dan manajemennya harus baik

Maksudnya adalah struktur organisasi yang terdiri dari satuan-satuan organisasi serta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Keempat faktor di atas merupakan satu kesatuan yang saling berperan dan terkait satu sama lain, namun yang mendasarinya adalah faktor manusia sebagai

---

<sup>19</sup> Solihin (2001: 60)

pelaksananya. Hal ini dikarenakan, dalam berbagai kegiatan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan karena merupakan penggerak segala kegiatan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa pemerintahan daerah adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom, dijalankan oleh semua sumber daya aparatur di dalam pemerintahan daerah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya aparatur daerah yang baik sejatinya akan dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Tanpa kualitas sumber daya manusia yang baik maka mekanisme berjalannya pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Pengertian baik yang dimaksud adalah pertama, terjaganya mentalitasnya atau adanya moral yang baik dalam arti jujur, mempunyai ras tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya dan dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau public servant. Kedua, memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

### **2.1.3. Konsep Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa menurut IGO (*Inlansche Gemeente Ordonnantie*) adalah peraturan zaman penjajahan yang umurnya panjang, artinya bahwa berlakunya peraturan tersebut jauh memasuki jaman R.I. Peraturan lain yang masih berlaku atau belum diganti ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). IGO sengaja diuraikan meskipun secara singkat karena dijumpai sampai sekarang di Desa dalam kenyataan adalah menurut IGO dengan perubahan

sekedarnya sebagai penyesuaian dengan keadaan dan perkembangan negara pada umumnya.

Dalam perspektif teoritik, kajian terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa” dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebutkan desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul” , maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi<sup>20</sup>.

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan republik Indonesia”.<sup>21</sup>

Struktur Pemerintah Desa disetiap Undang-undang mempunyai perbedaan, karena banyak Undang-undang yang mengkaji tentang Tata Pemerintahan Desa, di bawah ini bagan struktur Pemerintah Desa<sup>22</sup>.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu peragkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

<sup>20</sup> Kushandajani. 2008. Otonomi Desa berbasis Modal Sosial, Perspektif Socio-legal. hal.32

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>22</sup> A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 24.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten<sup>23</sup>.

Sedangkan organisasi pemerintahan desa terdiri dari :

- a. Unsur pemimpin, yaitu Kepala desa
- b. Unsur pembantu Kepala desa, yang terdiri dari,
  - 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
  - 2) Unsur Pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
  - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepla dusun.

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No 6 Tahun 2014 yang Dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

---

<sup>23</sup> Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia hal 62.

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa<sup>24</sup>.

Pemerintahan desa adalah pemerintahan terendah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan perpanjangan tangan pemerintahan pusat, posisi dan kedudukannya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Diterbitkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah Daerah, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level Desa.

Secara substansi UU No 6 tahun 2014 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonomi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan bertanggung jawab terhadap bupati dan walikota. Karena itu, istilah desa yang biasa dipergunakan di pulau jawa, bali dan Madura tidak bias berlaku secara general, tetapi harus didasarkan pada istilah yang dipergunakan oleh masing masing daerah, dengan mengacu pada suatu pengertian bahwa desa atau sebutan lainnya adalah nama kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

#### **2.1.4. Konsep Evaluasi**

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu

---

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat 2 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn<sup>25</sup>, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Kaitannya dengan kebijakan, menurut Ramdan dkk, ukuran efektivitas kebijakan yaitu:

1. Efisiensi, suatu kebijakan harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya secara optimal.
2. Adil, bobot kebijakan harus ditempatkan secara adil yakni kepentingan publik tidak terabaikan.
3. Mengarah kepada insentif, suatu kebijakan harus mengarah kepada atau merangsang tindakan dalam perbaikan dan peningkatan sasaran yang ditetapkan.
4. Diterima oleh publik, oleh karena diperuntukkan bagi kepentingan publik maka kebijakan yang baik harus diterima oleh public.
5. Moral, suatu kebijakan harus dilandasi oleh moral yang baik

---

<sup>25</sup> William N. Dunn.2003 Pengantar.*Analisis Kebijakan publik Edisi Kedu*. Yogyakarta: UGM Press.Hal.608

Tujuan pokok evaluasi untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

Secara umum, William N Dunn (dalam Riant Nugroho, 2009:537)<sup>26</sup> menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Efektivitas.
2. Efisiensi.
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan;

Menurut William N Dunn dalam Riant Nugroho<sup>27</sup>, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

---

<sup>26</sup> Nugroho., Riant., 2009., *Public Policy.*, Yogyakarta: UGM Press.

<sup>27</sup> Ibid.Hal.536

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

Sedangkan menurut Wirawan<sup>28</sup> evaluasi adalah: “Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”.

Menurut buku Metode Riset Evaluasi, Hadi<sup>29</sup> mendefinisikan evaluasi sebagai “proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator”. Selanjutnya dalam buku yang sama Hadi<sup>30</sup> memaparkan riset evaluasi sebagai “Aplikasi sistematis dari prosedur riset sosial untuk menaksir atau menilai konseptualisasi dan desain, implementasi serta utilitas program intervensi sosial. Menurut definisi ini, riset evaluasi melibatkan pemakaian metodologi riset sosial untuk memberikan putusan atau penilaian dan untuk meningkatkan perencanaan, pemantauan, efektivitas, dan efisiensi suatu program sosial. Program sosial tersebut beragam diantaranya ialah, program kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan program layanan manusia lainnya”.

---

<sup>28</sup> Wirawan. 2012. Evaluasi:Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Depok PT Raja Grafindo Persada.hal.7

<sup>29</sup> Hadi, Nor. 2011. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta : Graha Ilmu hal.7

<sup>30</sup>Ibid.hal.13-14

Pendapat selanjutnya muncul dari Husni<sup>31</sup> yang menyatakan bahwa “evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan”. Sedangkan menurut Arikunto<sup>32</sup> “Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sejalan dengan definisi evaluasi menurut Wirawan dan Hadi, secara sederhana menurut peneliti evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah tahapan penilaian yang ditujukan kepada objek evaluasi, untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dideskripsikan dalam bentuk informasi.

Dalam penelitian ini objek yang akan dievaluasi adalah program BUMDes dalam Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Al-Mukammil Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, yang dalam proses evaluasinya yaitu sasaran kebijakan, diluar kebijakan, kondisi, pembiayaan langsung dan tidak langsung. Hasil yang akan dideskripsikan dari evaluasi ini ialah informasi mengenai Evaluasi Program BUMDes dibidang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Al- Mukammil Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. serta hasil evaluasi yang merujuk pada penilaian unsur Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Al-Mukammil yang terlaksana dengan baik dan tidak terlaksana dengan baik.

#### **2.1.5. Konsep Program**

Pengertian Program Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling

---

<sup>31</sup> Husni, H.S. 2010. Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan. Jakarta. Hal.971

<sup>32</sup> Arikunto, S. 2010. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta..hal

terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan<sup>33</sup>. Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran<sup>34</sup>. Berbagai definisi tentang desain saling berbeda antara satu dengan yang lainnya misalnya, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa desain berarti kerangka, persiapan atau rancangan. Menurut Harjanto mengemukakan bahwa desain ialah berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan<sup>35</sup>.

Desain/perencanaan merupakan gambaran beberapa kegiatan, siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya dan faktor pendukung berupa dana dan waktu, semakin jelas pekerjaan pencapaiannya karena ada petunjuk pelaksanaan serta alat bantu yang mempermudah untuk melaksanakannya, semakin terarah suatu pekerjaan karena dalam perencanaan itu ada target yang menjadi sasaran pencapaian sekaligus barometer pencapaian serta persentase pencapaian kegiatan dalam waktu tertentu. Perencanaan dapat menjadi penentu keberhasilan serta

---

<sup>33</sup> Muhaemin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, Manajemen Pendidikan, Jakarta: ...kencana, h. 349

<sup>34</sup> Mudasir, 2012, Desain Pembelajaran, Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah, h. 1

<sup>35</sup> Mardia Hayati, 2012, Desain Pembelajaran Berbasis Karakter, Pekanbaru: Al- Mujtahadah .Press, Hal. 11

menjadi bahan analisa terhadap kebenaran dan kinerja seseorang agar dapat diketahui ketepatan seseorang dan kelompok dalam bekerja<sup>36</sup>.

1. Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

#### **2.1.6. Konsep Evaluasi Program**

Konsep Program Menurut Riant Nugrono adalah penilaian terhadap pencapaian variasi dalam indikator-indikator kinerja yang yang di gunakan untuk menjawab tugas.selain itu indikator evalu-asi Program menurut Winarno<sup>37</sup> ada lima yaitu:

1. Sasaran kebijakan
2. Di luar kebijakan
3. Kondisi
4. Pembiayaan langsung
5. Pembiayaan tidak lansung

---

<sup>36</sup>Mudasir, Op.Cit., hal. 2-3

<sup>37</sup> Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. GAPS. Yogyakarta.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan.

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi program dapat berbeda-beda sesuai dengan evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dengan mempelajari dan melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

Evaluasi program merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi program tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Menurut O.Jones<sup>38</sup> evaluasi program adalah suatu aktifitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan semua proses pemerintahan. Program itu bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk rekomendasi.

Dua orang ahli evaluasi, yaitu Cronbach dan Stufflebeam (dalam dan Jabar, mengemukakan bahwa evaluasi program upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Kemudian menurut Arikunto

dan Jabar, evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Dengan demikian, kegiatan evaluasi program pada tujuan, atau dengan kata lain, tujuan tersebut dijadikan ukuran keberhasilan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan.

Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan yaitu:

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
4. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat atau mengulangi lagi program di lain waktu, karena program tersebut

berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain

(Arikunto dan Jabar, 2004:8-9). Sudjana (2006:51) mengelompokkan model-model evaluasi program menjadi enam (6) kategori yaitu:

1. Evaluasi terfokus pada pengambilan keputusan.
2. Evaluasi unsur-unsur program.
3. Evaluasi jenis dan tipe kegiatan.
4. Evaluasi pelaksanaan program.

Fokus model-model yang termasuk dalam kategori ini adalah evaluasi berbagai proses pelaksanaan program. Sebagian model berhubungan dengan proses evaluasi lanjutan terhadap pelaksanaan program.

Enam model yang termasuk ke dalam kategori ini adalah sebagai berikut :

- a. Model Appraisal.
  - b. Pengelolaan Data.
  - c. Model Proses secara alamiah.
  - d. Evaluasi Monitoring.
  - e. Evaluasi Perkembangan.
  - f. Evaluasi Transaksi.
5. Evaluasi pencapaian tujuan khusus program
  6. Evaluasi hasil dan pengaruh program

Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah/swasta maka seluruh aktivitas instansi/lembaga tersebut harus dapat diukur. Dalam

rangka melakukan pengukuran kinerja instansi, perlu dibuat dulu rencana kinerja tahunan yang diambil dari strategik yang berjangka lima tahunan.

Demikian Evaluasi Program dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlandasan suatu kebijakan secara cermat untuk mencari jawaban akan autcomen yang di hasilkan.sedangkan kinerja output ), Dan Hasil ( Outcome )

#### **2.1.7. Konsep BUMDes**

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Selanjutny BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah didirikan antara lain Mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di daerah pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada masyarakat pedesaan di daerah tersebut. Hal Ini dimaksudkan agar keberadaan BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa dan tidak mematikan usaha masyarakat di pedesaan tersebut. Disamping itu juga usaha tersebut tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di daerah pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat pedesaan.

BUMDes sebagai Salah satu lembaga ekonomi di pedesaan modal usahanya dibangun atas ‘inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

#### **2.1.8. Konsep Pengelolaan**

Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan yang di lakukan untuk menentukan

dan mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumber sumber lainnya<sup>39</sup>.

Menurut Hasibuan<sup>40</sup> Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Definisi diatas bahwa untuk tercapai atau tidak tercapainya tujuan yang dimaksud tergantung kepada yang bergerak atau tidak Bergeraknya semua anggota manajemen, mulai dari yang tertinggi/atas, menengah sampai paling bawah. Semua kegiatan haruslah tercapai dan tepat sasaran, mengingat kesemua kegiatan haruslah tepat sarannya dan hanyalah merupakan pemborosan tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*. Hal tersebut sudah tentu merupakan mis-management.

Menurut Balderton<sup>41</sup> (dalam Adisasmita) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita<sup>42</sup> mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

---

<sup>39</sup> Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. GAPS. Yogyakarta

<sup>40</sup> Hasibuan, Malayu S.P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

<sup>41</sup> Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta. hal21

<sup>42</sup> Ibir hal22

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Oey Liang Lee<sup>43</sup> (dalam Ranupandojo,) mendefinisikan bahwa, “Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barang-barang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli di atas, maka yang di maksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan asli desa. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian

---

<sup>43</sup> Oey Liang. (2010). Pengantar Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. Hal3

## 2.2. Ulasan Karya

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Amri pada tahun 2015 dengan judul Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Timur Makmur Kecamatan Kepulauan Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program BUMDes secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik, namun belum maksimal. Dampak yang kurang baik dari program ini adalah biaya langsung.

Persamaan penelitaian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama melatar belakangi tentang Evaluasi BUMDes sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Amri adalah tentang Evaluasi pelaksanaan program BUMDes sedangkan penulis meneliti tentang Evaluasi BUMDes Pengelolaan UED-SP.

Penelitaian yang di lakukan oleh Mirianto dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Di Kecamatan Bengkalis penelitian ini di lakukan dengan penekatan kualitatif, di mana prosedur penelitaia yang menghasilkan data deskristif.

Hasil penelitian menemukan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Di Kecamatan Bengkalis secara keseluruhan Kurang Berhasil.

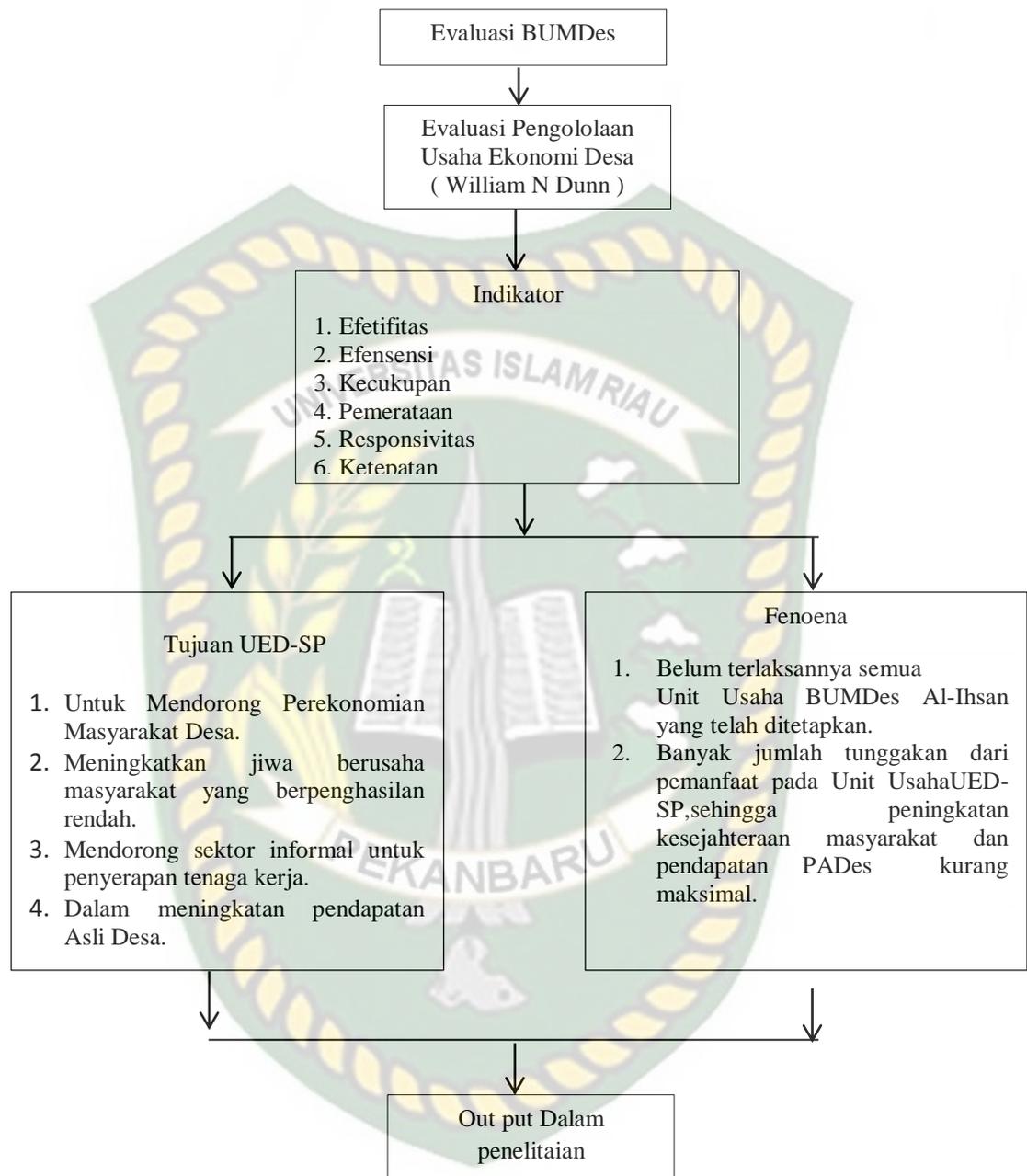
Ada pun persamaan nya dengan penelitian ini adalah sama-sama melatar belakangi tentang Evaluasi pelaksanaan Program.sedangkan perberdaan dari ke

dua penelaitian ini adalah penelitian yang di lakukan oleh peneliti terdahulu membahas tentang pelaksanaan Program BUMdes sedangkan panelitian ini Membahasa tentang tentang Evaluasi Pengelolaan.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikiran adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Berangkat dari pedoman pada variabel penelitian “Evaluasi Badan Usaha Milik Desa Dalam pengelolaan UED-SP Al-mukammil di desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.”, kemudian mengacu pada telaah pustaka yang telah dijadikan indikator penelitian permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes, Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa dengan indikator penelitian yang dijelaskan diatas maka akan menjelaskan arah penelitian ini, teori yang dijadikan indikator dapat ditampilkan pada gambar berikut ini:



**Gambar II.1. Kerangka Pemikiran.**

Dari gambar karangka pemikiran di atas, penulis dapat di jelaskan bahwa Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Mendorong perekonomian masyarakat desa, Meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan

rendah, Mendorong sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja, Dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa.

#### **2.4. Konsep Operasional**

Untuk kesepahaman pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan salah pemahaman dan pengertian, maka akan dijelaskan dan dirumuskan beberapa konsep sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai mekanisme.
- b. Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan yang di lakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumber sumber lainnya.
- c. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam UED-SP adalah Lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat desa dalam memberikan pinjaman bergulir kepada masyarakat desa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- d. Evaluasi kebijakan adalah mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dan hasil yang hendak dicapai.
- e. Evaluasi Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ialah program yang selama ini dilaksanakan Oleh Kabupaten Bengkalis khususnya Desa Puteri Sembilan.

- f. Evaluasi dalam penelitian ini adalah Evaluasi BUMDes dalam Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).
- g. UED-SP adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat.
- h. Pemberdayaan UED-SP ialah tindakan sosial yang dilaksanakan oleh lembaga UED-SP dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

#### **2.5. Operasional Variabel**

Secara terperinci operasinalisasi variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.1 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Penilaian
Evaluasi adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya	Evaluasi Pengelolaan BUMDes	Efektifitas	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Bertambahnya Usaha di Desa Turunnya angka kemiskinan	Baik
		Effesiensi	Tahapan Peminjaman Upaya meminimalisir tunggakan Inovasi dalam administrasi pelayanan	
		Kecukupan	Kebijakan dalam menghadapi tunggakan Laporan pengelola kepada Pemerintah Komunikasi (Etika) Pengelola	Cukup Baik
		Pemerataan	Keberpihakan pengelola terhadap pemanfaat Upaya mengurangi kesenjangan Pemahaman Perbub Nomor 38 Tahun 2014	
		Resposivitas	Respon masyarakat terhadap UED-SP Partisipasi masyarakat terhadap UED-SP Pandangan masyarakat terhadap kelanjutan program	Tidak Baik
		Ketetapan	Keberadaan Pemanfaat Fiktif Proses penyitaan agunan Kebijakan dalam verifikasi berkas pemanfaat	

Sumber : Modifikasi Penulis

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitaian ini sebagai berikut :

1. BUMDes Al-Ihsan Desa Puetri Sembilan kecamatan Rupan Utara Kabupaten Bengkalis
2. Pengelola UED-SP Al-Mukamil Desa Puetri Sembilan kecamatan Rupan Utara Kabupaten Bengkalis
3. Pemanfaat UED-SP Al-Mukammil Desa Puetri Sembilan Kecamatan Rupan Utara Kabupaten Bengkalis

#### 3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 Hal. 11

### 3.3.Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Desa Puteri Sembilan Kecamatan Utara Rupa Kabupaten Bengkalis. Dalam Penelitian ini, Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis dengan alasan bahwa Desa Puteri Sembilan adalah Desa Pemekaran dan Desa baru yang ingin mandiri.

### 3.4. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,( sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah Instrumen kunci , teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan ),analisis data bersifat induktif.

Dalam penelitian Kualitatif tidak di persoalkan jumlah sampel, dalam hal ini jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak, terutama tergantung dari: (a) Tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan (b) Kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.

Penentuan subjek penelitian atau informan ini berdasarkan pendekatan purposive sampling. Metode purposive sampling menurut Sugiono yaitu penentuan sampel untuk tujuan atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini menurut Sugiono bahwa orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Adapun yang menjadi (key informan) dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Informen	Jumlah	Status Informen
1	Kepala Desa	1	<i>Informen</i>
2	Pendamping Desa Puteri Sembilan	1	<i>Informen</i>
3	Ketua BPD Desa Puteri Sembilan	1	<i>Informen</i>
4	Diruktur Bumdesa	1	<i>Key Informen</i>
5	Penegelola UED-SP	3	<i>Key Informen</i>
6	Tokoh Masyarakat	3	<i>Secondary Informen</i>
7	Masyrakat Penerima Pemanfaat	6	<i>Secondary Informen</i>
	Jumlah	16	

### 3.5. Teknik menentukan Inforem

Penelitian ini dilakukan di Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Adapun subjek penelitian sebagai informan penelitian yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Perolehan informan ini dilakukan dengan cara menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memilih sampel (informan kunci atau situasi sosial) sebaiknya dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Puteri Sembilan sekaligus pemegang otoritas UED-SP Al-Mukammil, Menurut Sugiyono dalam Puspita<sup>50</sup> menentukan informan selanjutnya ini ditentukan dengan metode *snowball sampling* atau bola salju, yaitu suatu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar.

<sup>50</sup> Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hal.37

Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang dengan sengaja, tetapi karena dua orang belum lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel menjadi banyak. Berikut ini informan dalam penelitian:

- a. Kepala Desa Puteri Sembilan
- b. Pendamping Desa Puteri Sembilan
- c. Ketua BPD Desa Puteri Sembilan
- d. Diruktur Bumdes Desa Puteri Sembilan
- e. Pengelola UED-SP Al- Mukammil (3) Orang
- f. Tokoh Masyarakat
- g. Pemanfaat UED-SP

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UEDSP) Al-Mukammil

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung.

- b. Interview yaitu langsung melakukan wawancara yang dilakukan secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara, digabungkan dengan teknik observasi.
- c. Dokumentasi yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, foto.

Analisa data di lakukan dengan “Uji Keabsahan Data” Tingkat kepercayaan dan devadilitas terhadap penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuktikan data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya teknik yang digunakan adalah Teknik Triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan membandingkan hasil wawancara dengan semua yang terkait dalam penelitian ini. Triangulasi secara umum memperoleh check, re-check, dan crosscheck secara materi/data/informan dengan observasi penelitian selanjutnya hasil observasi di crosscheck melalui persepsi peneliti.

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Status informan
1	Kepala Desa	1	<i>Informan</i>
2	Pendamping Desa Puteri Sembilan	1	<i>Informan</i>
3	Ketua BPD Desa Puteri Sembilan	1	<i>Informan</i>
4	Diruktur Bumdes Desa puteri Sembilan	1	<i>Key Informan</i>
5	Pengelolaan UED-SP	3	<i>Key Informan</i>
6	Tokoh Masyarakat	3	<i>Secondary Informan</i>
7	Masyarkat penerima Pemanfaat	6	<i>Secondary Informan</i>
Jumlah		16	

### 3.6. Jenis dan Sumber Data

#### **Data primer**

Adalah data yang di dapat dengan tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai yaitu hasil wawancara menyangkut Evaluasi BUMDes .

#### **Data sekunder**

Adalah data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, arsip-arsip, struktur organsasi pegawai serta Peraturan Perundang-Undangan yang Menyangkut dengan penelitan ini

### 3.7. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data panelitian menggunakan cara-cara sebagai berikut :

1. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dengan seseorang untuk mendapatkan informasi data yang valid, Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanggung jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.
2. Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung ke lapangan terhadap gejala-gejala objek atau permasalahan.

### **3.8. Teknik analisis data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dan observasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami<sup>51</sup>.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman<sup>52</sup>, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

#### **a. Reduksi data**

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

#### **b. Penyajian Data**

---

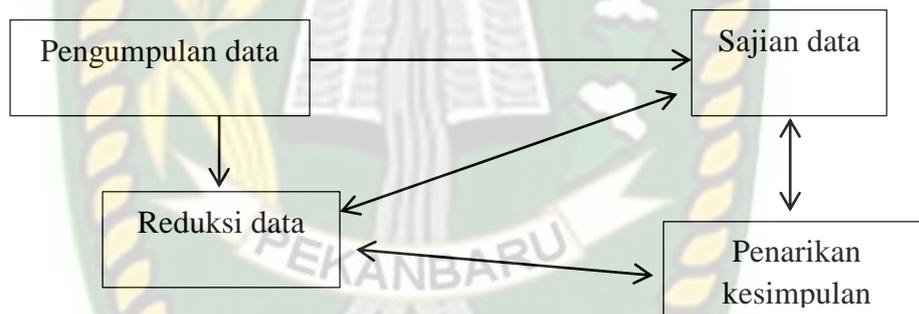
<sup>51</sup> Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta. Hal.333-345

<sup>52</sup> Ibid. Hal.204

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



Gambar 2: Teknik Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 333-345)

### 3.9.Sitematika Penulisan

**BAB.I Pendahuluan:** bab ini merupakan penjelasan secara umum,ringkasan,jelas,dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi proposal Tesis Meliputi antara belakang, Identifikasi masalah, Rumusan Masalah, Batas Masalah,tujuan dan kegunaan penelitian, oleh karena itu, bab ini akan meliputi uraian tentang

**BAB.II Kajian Kepustakaan:** dalam bab ini di kemukakan dengan umum, ringkas, jelas dan objektif tentang konsep teori, Ulasan Karya, kemudian menguraikan kerangka pemikiran,konsep oprasional,dan operasinal variable dan menyatakan hipotesis

**BAB III Metode Penelitian** Dalam Bab ini diuraikan tentang: Tipe Penelitian;Lokasi Penelitian;Populasi dan Sampel; Teknik Penarikan Sampel; Jenis dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data;Teknik Analisa Data.

### 3.10. Rencana Jadwal Penelitian

**Tabel III.2. Perincian Jadwal Penelitian Tentang**

NO	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020															
		Juli/ Agus				Sep				Okt/ Des				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan usulan peneliti	X	x	X	x												
2	Seminar usulan peneliti tesis							X									
3	Perbaikan Hasil Seminar Proposal								X								
4	Riset/ Penelitian Lapangan									X	x	x	x				
5	Pengelolaan dan Analisa Data										X	X	x				
6	Konsultasi Bimbingan Tesis										X	X	X	X	X		
7	Ujian tesis															X	X

## BAB IV

### 4.1 Gambaran Umum

#### 4.1.1 Identitas Responden

Karakteristik identitas responden adalah profil terhadap objek penelitian yang dapat memberikan hasil penelitian mengenai Evaluasi BUMDES dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Al-Mukamil Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Dimana untuk mengetahui hal tersebut, maka responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, pendaping Desa, BPD Sebagai pengawas Drektur Bumdes, Ketua UED-SP, Tokoh Masyarakat dan pemanfaat yang menggunakan Fasilitas Simpan pinjam di Desa Puteri Sembilan yakni ditetapkan sebanyak 16 responden.

Untuk penentuan sampel responden dikelompokkan menurut deskripsi responden Informen Penelitian, ada pun jumlah anggota Key Infomen yang dianggap tahu dalam hal Simpan pinjam di Desa Puteri Sembilan. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya dapat disajikan dengan uraian mengenai deskripsi identitas responden sebagai berikut.

#### 4.1.2 dentitas responden berdasarkan Usia

Dalam penelitian ini, usia responden dikelompokkan menjadi Empat bagian. Berdasarkan pengelompokan tersebut, ternyata pada usia diatas 40 s/d 50 tahun domina dalam Responden. Berdasarkan hasil penelitian, gambaran mengenai umur responden dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

**Tabel 4.1 Usia Responden**

Umur Responden ( Tahun )	Jumlah Responden	Persentase ( % )
18 – 28	3	18,75
29 - 39	4	25
40 – 50	6	37,5
➤ 50	3	18,75
Total	16	100

*Sumber: Data primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan data di atas bahwa usia 40 s/d 50 tahun lebih dominan di karenakan yang menduduki jabatan pengelolaan Unit Usaha UED-SP. Dari tabel di atas dapat lihat bahwa mayoritas responden yang dominan usia 40 s/d 50, atau 37,5 % .

#### **4.1.3 Identitas responden berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dilihat bahwa sebanyak 10 responden atau 62,5 % adalah responden Laki-Laki, dan sebanyak 6 responden atau 37,5 % adalah Repomden Perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah Laki -laki.

Berdasarkan penelitian, maka gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

**Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase ( % )</b>
Laki- laki	10	62,5
Perempuan	6	37,5
Total	16	100

*Sumber: Data primer yang diolah, 2020*

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden dalam penelitian ini didominasi oleh Laki-Laki sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.2. Fakta ini dapat dipahami karena bahwa pengelola BUMDEs dan Pemanfaat yang di dominasi oleh laki-laki.

#### **4.1.4 Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan**

Responden yang paling banyak menduduki Jabatan Dalam pengelolaan BUMDES dan UED-SP dalam penelitian ini adalah responden yang berpendidikan SMA/SMK. Sebanyak 8 orang atau 50%, Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang berpendidikan SD yaitu Sebanyak 2 Orang atau 12,5%. Distribusi responden berdasarkan pendidikan yang dimiliki sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Pendidikan Responden**

Tingkat pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
SD	2	12,5
SMP	3	18,75
SMA/SMK	8	50
Deploma /Sarjana	3	18,75
Total	16	100

*Sumber: Data primer yang diolah, 2020*

Responden yang berpendidikan SMA lebih banyak yaitu 8 Orang atau 50%, sedangkan responden yang berpendidikan SD sedikit atau 12,5%, dari tabel di atas rata-rata pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) yang berpendidikan SMA/ SMK lebih dominan dalam Responden.

#### **4.1.5 Kondisi Geografis Kecamatan Rupert Utara**

Kecamatan Rupert Utara merupakan suatu wilayah administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Kecamatan Rupert Utara terbentuk berdasar Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis ( PERDA ) Nomor : 1 Tahun 2001 tanggal 13 Oktober 2003, Rupert Utara Secara geografis, berbatasan dengan Selat Malaka disebelah utara, dan sebelah barat dan timur, dan berbatasan dengan kecamatan Rupert disebelah selatan. Pada Tahun 2013 jumlah Desa di Rupert Utara delapan desa yaitu Desa Tanjung Medang, Teluk Rhu, Tanjung Punak, Kadur Titi Akar, Hutan Ayu, Suka Damai, Puteri Sembilan.

Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Rupert Utara, luas wilayah Kecamatan Rupert Utara adalah 628,50 km<sup>2</sup>, dengan desa terluas adalah Desa Titi Akar dengan luas 185 km<sup>2</sup> atau sebesar 29,44% dari luas keseluruhan Kecamatan Rupert Utara. Diantara desa Wilayah terkecil adalah Desa Puteri Sembilan dengan luas 62 km<sup>2</sup> dari luas keseluruhan. Adapun desa terjauh dari ibu kota Kecamatan Rupert Utara adalah Desa Titi Akar dengan jarak lurus 25 km. dan jarak terdekat adalah Desa Tanjung Medang sebagai ibukota Kecamatan Rupert Utara.

**Gambar 4.1**

**Peta Administrasi Kecamatan Rupert Utara**



*Sumber : BPS Kecamatan Rupert Utara, 2020*

Secara geografis seluruh wilayah pemerintah desa dikecamatan Rupert Utara merupakan daerah pesisir, karena desa diKecamatan Rupert Utara berbatasan langsung dengan garis pantai.

**Tabel 4.4**  
**Luas Wilayah Kecamatan Rupert Utara**

No	Nama Kelurahan/Desa	Luas Wilayah
1	Desa Titi Akar	185,0 km <sup>2</sup>
2	Desa Tanjung Medang	75,0 km <sup>2</sup>
3	Desa Teluk Rhu	72,5 km <sup>2</sup>
4	Desa Tanjung Punak	66,0 km <sup>2</sup>
5	Desa Kadur	76,0 km <sup>2</sup>
6	Desa Puteri Sembilan	39,0 km <sup>2</sup>
7	Desa Suka Damai	59,0 km <sup>2</sup>
8	Desa Hutan Ayu	56,0 km <sup>2</sup>
<b>T o t a l</b>		<b>628,50 km<sup>2</sup></b>

*Sumber : Kantor Kecamatan Rupert Utara, 2020*

Dari table di atas bawah jumlah desa di Kecamatan Rupert Utara berjumlah 8 desa, yaitu Desa Tanjung Medang, Teluk Rhu, Tanjung Punak, Kadur, Titi Akar, Hutan Ayu, Suka Damai, Puteri Sembilan, adapun suku yang tinggal di Kecamatan Rupert Utara di antaranya seberikut ini.

**Tabel 4.5**  
**Suku yang tinggal di Kecamatan Rupert Utara**

No	Jenis Suku	Jumlah (%)
1	Melayu	35
2	Cina Keturunan	15
3	Akit/Asli	40
4	Campuran (Batak, Jawa dan lain-lainnya)	10

*Sumber: Kantor Camat Rupert Utara, 2020*

#### **4.1.6 Kondisi Aparatur Kecamatan Rupert Utara**

Adapun jumlah desa diwilayah Kecamatan Rupert Utara berjumlah 8 ( Delapan ) desa yang terdiri dari, Desa Tanjung Medang, Teluk Rhu, Tanjung Punak, Kadur Titi Akar, Hutan Ayu, Suka Damai, Puteri Sembilan, Kedelapan desa diwilayah Kecamatan Rupert Utara tersebut merupakan berstatus desa swadaya.

Pada tahun 2020, jumlah RW di kecamatan berjumlah 38 RW dan 81 RT dengan jumlah perangkat desa sebanyak 88 orang.

Tabel 4.6

## Jumlah Perangkat Desa Menurut Desa dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Perangkat Desa		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Titi Akar	7	2	9
Tanjung Medang	7	5	12
Teluk Rhu	6	5	11
Tanjung Punak	8	3	11
Kadur	9	5	14
Hutan Ayu	6	4	10
Suka Damai	7	3	10
Puteri Sembilan	7	4	11
<b>Jumlah Total</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>88</b>

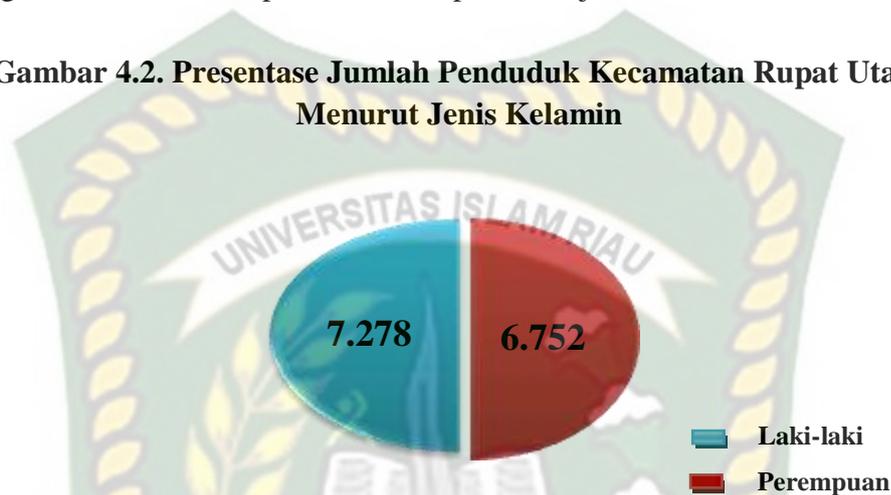
Sumber: BPS Kecamatan Rupert Utara, 2020

#### 4.1.7 Kondisi Penduduk Kecamatan Rupert Utara

Jumlah penduduk Kecamatan Rupert Utara pada tahun 2020 berjumlah 14.030 jiwa, yang terdiri dari 7.278 jiwa adalah laki-laki dan 6.752 jiwa adalah perempuan. dengan sex rasio sebesar 108, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang besar untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 orang perempuan terdapat 108 orang laki-laki. dengan luas wilayah Kecamatan Rupert Utara 628,50 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya 14.030 jiwa, ternyata menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 23 yang artinya dalam setiap 1 km<sup>2</sup> dihuni oleh sekitar 23 orang. Berdasarkan kelompok umurnya, jumlah

warga terbanyak dikecamatan Rupert Utara berada di kelompok umur 15-19 tahun, diikuti oleh kelompok umur 10-14 tahun dan 20-24 tahun. Adapun jumlah keluarga di Kecamatan Rupert Utara terdapat 3.488 jumlah.

**Gambar 4.2. Presentase Jumlah Penduduk Kecamatan Rupert Utara Menurut Jenis Kelamin**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kec. Rupert Utara, 2020*

#### 4.1.8 Profil Desa Puteri Sembilan

Desa Puteri Sembilan merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Desa Puteri Sembilan membagi daerah pemerintahannya Menjadi atas 2 (Dua) dusun yaitu Dusun Parit Paru Dan Dusun Pasir Putih.

Jarak Desa Puteri Sembilan dengan kota Kecamatan 15 km sedangkan jarak ke kota Kabupaten Bengkalis yaitu 85 km dan dapat ditempuh dengan rata-rata waktu +- 3 Jam dan dapat ditempuh melalui jalur darat maupun laut. Pada umumnya masyarakat di desa Puteri Sembilan menggunakan transportasi air Dan juga Stransportasi darat menuju ke kota kabupaten.

#### 4.1.9 Keadaan Geografis

##### 1. Batas Wilayah

Secara administrasi wilayah ini berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Punak
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kadur Dan Makeruh
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Melaka
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kadur dan Tanjung Punak

##### 2. Luas Wialayah

Luas Desa Puteri Sembilan 62 km yang terbagi atas :

- a. Luas Sawah : 0 Ha
- b. Luas Wialayah Perkebunan : 1.960 Ha
- c. Luas Ladang : 530 Ha
- d. Luas Belukar : 17 Ha
- e. Luas Rawa-Rawa : 8 Ha

##### 3. Kondisi Sosial Budaya

###### a. Pendidikan

Pendidikan merupakan pendidikan formal yang sangat penting dewasa ini mengingat pendidikan suatu masyarakat sangat diperlukan karena dengan pendidikan merupakan salah satu faktor dalam menunjang kemajuan suatu bangsa terlebih juga kemajuan suatu daerah. Jika dilihat dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan, semuanya membutuhkan orang-orang yang memiliki sumber daya mansia (SDM) yang terampil dan berkaulitas di wilayah daerah desa sehingga desa tersebut status desanya bisa terakat dibanding desa yang lain.

Sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke-4 yang berbunyi, Menerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini ialah pendidikan, pendidikan di desa Puteri Sembilan sehingga menciptakan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang berkualitas, serta mampu membangun desa yang lebih baik dari pada sebelumnya.

**Tabel 4.7**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Puteri Sembilan Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum sekolah	3
2	Buta huruf	4
3	Tamat TK	352
3	Tamat SD	751
4	Tamat SLTP	82
5	Tamat SLTA	93
6	Tamat AKD/PT/D1-D3	9
7	Sarjana S1	39
8	Sarjana S2	0

*Sumber: Kantor Desa Puteri Sembilan , 2020*

#### **b. Agama**

Adapun Masyarakat Desa Puteri Sembilan secara keseluruhan menganut 4 ( Empat ) Keyakina agama, yaitu agama Islam, Budha/Hindu, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. dan mayoritas masyarakat desa Puteri Sembilan menganut agama isalam, Namun pada saat ini hubungan antara kerukunan antar umat

beragama tetap berjalan dengan baik berkat saling menghargai antar umat beragama di wilayah Desa Puteri Sembilan.

**Tabel 4.8**  
**Keadaan Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1512 Jiwa
2	Kristen Protestan	- Jiwa
3	Kristen Katolik	10 Jiwa
4	Budha	150 Jiwa
5	Hindu	- Jiwa

*Sumber: Kantor Desa Puteri Sembilan, 2020*

### c. Mata Pencaharian Penduduk

Sesuai dengan potensi desa, masyarakat Desa Puteri Sembilan mata pencarian utama penduduk masyarakat desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis sebagian besar bermata pencaharian disektor perikanan dikarenakan daerah persisir pantai menghadap selat malaka yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, juga mata pencarian yang lain yaitu perkebunan di antaranya perkebun karet, perkebunan sawit. namun pada saat ini masyarakat desa Puteri Sembilan sudah mulai menyadari akan pentingnya perkebunan dikarenakan juga perkebunan hal menjanjikan untuk masa yang akan datang atau aset yang nampak oleh mata di hal tersebut dapat dilihat diantaranya berikut :

Tabel 4.9

## Mata Pencarian Masyarakat Desa Puteri Sembilan Tahun 2020

No	Mata Pencarian	Jumlah (orang)
1	Nelayan	489
2	Guru	75
3	PNS	40
4	TNI/ POLRI	35
5	Pertani	210
6	Wirausaha/ Pedagang	380
7	Perkebunan /Buruh/ Karyawan	145
8	Buruh Tani	31
9	Peternak	202
10	Jasa	6
11	Pekerja Seni	3
12	Pensiun	4

Sumber: Kantor Desa Puteri Sembilan , 2020

#### 4.1.10 Badan Usaha Milik Desa ( BUMdes ) Al-Hisan

##### Lantar Belakang BUMdes Al- Hisan

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi didesa yang berpungsi sebagai lembaga social ( *Sosial institution* ) dan komersial ( *Commercial institution* ). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada

kepetingan masyarakat melalui kontribusinya dan menyediakan pelayanan social. sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local kepasar<sup>53</sup>.

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor .39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes di artikan sebagai mana yang berbunyi :

Badan Usah Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ di dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat<sup>54</sup>.

Program Pembangunan Masyarakat Desa dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bidang usaha yang di jalankan berdasarkan pada potensi desa. Keuntungan yang di peroleh di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, Operasionalisasinya di control secara bersama oleh BPD.

Tujuan mendirikan BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Adapun modal awal Bagi BUMDes yang menjadi pendapatan pokok bersumber dari Dana Desa. Adapun dasar-dasar berdirinya badan Usahan Milik Desa ( BUMDes ) dari hasil musawarah Desa Puteri Sembilan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015, Peraturan Desa

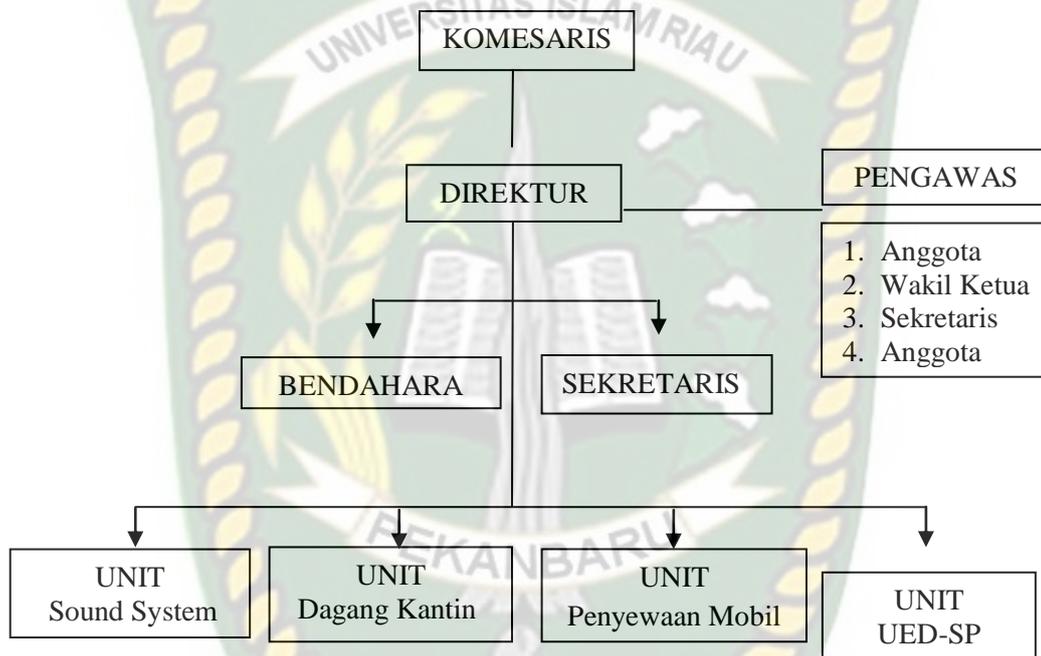
<sup>53</sup>Depertemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika system bembangunan ( PKDSP ).2007 Hal 3

<sup>54</sup> Pasal 213 ayat (1) UU No.32 2004 jo.UU No.23 2014 Tentang Pemerinatah Daerah

Puteri Sembilan Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Adapun Struktur Organisasi Bumdes Al-Hisan antara lain Sebagai berikut :

**Gambar 4.3. Struktur Organisasi BUMDES Desa Puteri Sembilan**



*Sumber: Kantor BUMDES Puteri Sembilan, 2020.*

Dari Struktur Bumdes Al-Hisan tersebut,serta musyawarah desa pasal 7 Peraturan Desa Nomor: 3 Tahun 2015 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes Al-Ihsan Menjalankan 9 ( Sembilan ) Bidang Usaha. Unit-unit Usaha BUMDes Al-Ihsan yang telah di bentuk dan dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai berikut:

1. Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
2. Unit Usaha perdagangang
3. Unit Usaha Penyewaan Barang

4. Unit Usaha Air Minum Desa
5. Unit Usaha Rumah Tangga
6. Unit Usaha Desa Wisata
7. Unit Usaha Nelayan
8. Unit Usaha Pertanian
9. Unit Usaha Pasar Desa

Dari 9 ( Sembilan ) Unit Usaha yang telah di bentuk hanya 5 ( Lima ) yang baru dijalankan oleh BUMDes Al-Ihsan hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam pengelolaan unit usaha yang telah di bentuk oleh BUMdes belum terlaksana dengan maxsimal, saat ini BUMDes hanya mampu menjalankan sebanyak 3 ( Tiga ) unit usaha sebagai berikut :

1. Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
2. Unit Usaha Perdagangang ( Gas Elpiji dan Rumah Makan )
3. Unit Usaha Penyewaan Barang ( Mobil Anggkutan dan Sound sistem)

BUMdes Desa Puteri Sembilan dalam menjalankan unit-unit usaha yang telah di bentuk oleh BUMDes Al-Ihsan, mendapat modal awal dari peryertaan modal dari pemerintah desa yang bersumber dari Hibah Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada saat Bapak Harian saleh yang menjabat sebagai Bupati Bengkalis dan APBDDes Desa Puteri Sembilan setelah dibentuknya BUMDes dan dapat dilihat dari table sebagai berikut :

Tabel 4.10 Modal Awal BUMDes AI-Ihsan

No	Bidang Usaha	Unit Usaha	Jumlah Modal	Sumber Dana
1.	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam		Rp. 1.000.000.000	Hibah pemda Kab. Bengkalis tahu 2015
2.	Usaha perdagangan	Gas Elpiji	Rp. 141.000.000	DD Tahun 2019
		Rumah Makan	Rp. 55.000.000	DD Tahun 2018
3.	Usaha Penyewaan Barang	Mobil Anggkutan	Rp. 100.000.000	DD Tahun 2019
		Sound system	Rp. 45.000.000	DD Tahun 2018
Jumlah Total			Rp.1.341.000.000	

Sumber :Sekretariat BUMDES

Berdasarkan praobservasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini belum mencapai target secara maksimal, artinya tujuan BUMDes supaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) belum tercapai. diantaranya penungakana pada pemanfaat dan beberapa program pada BUMDes belum dapat berjalan secara maksiamal, dan bahkan ada dari beberapa program yang belum terlaksana.

#### 4.1.11 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) AI-Mukamil

##### Latar Belakang UED-SP AI-Mukamil

UED-SP AI-Mukamil berdiri pada tanggal 25 Mei 2013 di Kantor Desa Puteri Sembilan, yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat dari dua daerah kepala dusun, RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat. Adapun Kantor UED-SP AI-Mukamil beralamat di Jalan Pelajar Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara

Kabupaten Bengkalis. UED-SP Puteri Sembilan mendapat bantuan Hibah dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 1000.000.000,- pada tahun 2013.

Sementara dana hibah dari APBD Provinsi tidak ada, sehingga total dana sampai dengan tahun 2020 Masih 1 milyar rupiah dan dana hibah itu lah yang bergulir pada saat ini.

Pengelola UED-SP Puteri Sembilan pada periode 2015/2020 diantaranya terdiri dari 4 orang pengelolah, 3 orang pemegang rekening otoritas, 2 orang kader pemberdayaan masyarakat dan 1 orang pengawas umum. UED-SP Al-Mukamil adalah lembaga usaha milik desa yang berperan secara langsung memberikan dukungan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjam modal sehingga usaha untuk memberdayakan usaha-usaha yang ada di desa Puteri Sembilan, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat lebih bisa mandiri dalam mengurus perekonomiannya, juga untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa Puteri Sembilan.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Al-Mukamil merupakan salah satu lembaga desa yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa yang bersangkutan usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok di antara lain:

1. Perdagangan: kios, warung, kantin, dll.
2. Pertanian: tanaman pangan.
3. Perkebunan: sawit, karet, kelapa, dll.
4. Perternakan: itik, ayam, sapi, kerbau, kambing, dll.
5. Jasa: pembengkelan, salon, service komputer dan hp, dll.

6. Perikanan: perikanan tangkap, tembak, dll.
7. Industri rumah tangga: pembuatan kerupuk, pengolahan ikan, kerajinan tangan, dll.

UED-SP berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut. UED-SP Puteri Sembilan sebagai usaha bersama milik desa yang berpedoman pada AD-ART dan petunjuk teknis dari Kabupaten Bengkalis. Dimana pada akhir tahun melaksanakan tutup buku dengan mengadakan forum musyawarah rapat anggota tahunan. Dalam hal ini pengurus dan pengelola harus mengundang seluruh anggota untuk bergabung supaya lebih jelas dan transparan dalam memberikan laporan. Kemudian membahas tentang AD-ART dan melakukan evaluasi kinerja selama setahun, serta dilanjutkan dengan pembahasan Sisa Hasil Usaha (SHU).

#### **4.1.12 Tugas dan Tanggung Jawab Pelaku Program**

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998).<sup>55</sup>

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah untuk mengelolah Dana Usaha Desa/Kelurahan dan dana yang

---

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. tujuan dibentuknya UED-SP adalah:

1. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengolahan Dana Usaha Desa/Kelurahan secara transparan.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib.
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan.
8. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa/Kelurahan.
9. Untuk meningkat pendapatan asli desa

Dan adapun kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) meliputi:

1. Memberi pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/Kelurahan yang dinilai produktif.
2. Menerima pinjaman uang dari masyarakat Desa/ Kelurahan sebagai anggota.

3. Ikut serta memberi bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kegiatan usahanya.
4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/pengkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.<sup>56</sup>

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) merupakan tanggung jawab masyarakat melalui pengurus kelembagaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam yang telah terbentuk, sedangkan kegiatan ekonomi yang telah terciptakan perlu dikembangkan dengan bantuan pembinaan pihak-pihak terkait. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab pelaku program:

#### a. Organisasi

Adapun struktur organisasi di tingkat Desa sebagai berikut:

**Gambar 4.4 Struktur Organisasi UED-SP Desa Puteri Sembilan**



*Sumber: Kantor UED-SP Puteri Sembilan, 2020.*

<sup>56</sup> Peraturan Bupati Bengkalis No. 38 Tahun 2014. "Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) Kabupaten Bengkalis".

Desa Puteri Sembilan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di kelolah oleh beberapa orang pengurus yang di bentuk melalui musyawarah desa dan juga merealisasikan program pemberdayaan ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 4.11**

**Pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Puteri Sembilan**

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Kepala Desa	Komisaris
2	Kamizan,S.si	Pendamping Desa
3	Syairul S.Pdi	Direktur Bumdes
4	Syahrudin	Ketua BPD/ Pengawas Umum
5	Saharudin	Pengelola UED-SP/ Ketua
6	Poni listari	Pengelola UED-SP/ Kasir
7	Surarti,S.Pd.I	Pengelola UED-SP/ Tata Usaha (TU)
8	Kayadi	Pengelola UED-SP/Staf Analisis Kredit (SAK)
9	Muhamad Khalid S.Tr.T	Pengelola UED-SP/Kader Pembedayaan Masyarakat (KPM)

*Sumber: Kantor UED-SP Al-Mukamil, 2020.*

Dari tabel terlihat susunan pengurus yang terlibat dalam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Al-Mukamil Desa Puteri Sembilan. Pengurus UED-SP Tersebut dipilih melalui musyawarah desa, dengan masa kerja selam 3 tahun, dan berdasarkan surat keputusan desa, dalam hal ini terkecuali pendamping desa ia tidak melalui musyawarah desa akan tetapi melainkan surat keputusan pemerintah Kabupaten.

Untuk menjalankan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) ini diperlukan sumberdaya manusia ( SDM ) yang berkualitas dalam pengelola yang sangat baik sehingga program ini dapat berjalan semaksimal mungkin. Adapun pengelolaan bertujuan membuka lapangan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ). pengelolaan yang dimaksud disini yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. dan perencanaan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis No.38 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) Kabupaten Bengkalis.

#### **b). Manajemen**

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) merupakan lembaga keuangan mikro dalam bentuk kegiatan program pemberdayaan Masyarakat desa. Yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberian dan pinjaman kepada pemanfaat secara bergulir di desa,serta untuk meningkatkan Pendapatan Desa ( Pades ). Adapun Program ini memiliki aturan dan petunjuk teknis tentang program peningkatan keberdayaan masyarakat Kabupaten Bengkalis Nomor : 38 tahun 2014 Panduan Operasional dan Panduan Umum yang disusun oleh tim koordinasi pembinaan dan pengendalian program perbedayaan desa Provinsi Riau. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pijam ( UED-SP ) Al-Mukamil juga memiliki AD-ART yang merupakan dasar dan landasan operasional kegiatan pengelolaan. didalamnya tercantum tugas dan tanggung jawab serta hal-hal yang berkaitan dengan proses Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Al-

Mukamil.bahkan juga dari segi pelaporan keuangan menggunakan sistem komputerisasi.

**c ). Keanggotaan**

Sampai dengan bulan November 2020 anggota UED-SP Al-Mukamil Desa Puteri Sembilan berjumlah 193 Pemanfaat,Namun pemanfaat bermasalah yang menjadi masalah penugakan yang jumlah 122 orang sehingga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Al-Mukamil menjadi pakum dan kerugian dikarenakan banyaknya penunggakan-penunggakan pemanfaat.

**1. Komesaris**

Komesaris bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) di antaranya berkewajiban:

- Memberikan nasehat kepada Direktur dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
- Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelola BUMDes.
- Mengendali pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMdes.

Adapun kewenangan Komesaris dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) di antaranya:

- Meminta penjelasan dari Direktur mengenai persoalan yang menyakut pengelolaan unit usaha.
- Melindungi unit usaha terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

- Menunjukan seseorang atau beberapa orang yang di anggap ahli untuk melakukan audit terhadap kinerja BUMDes apa bila di angap perlu.
- Memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tatakerja BUMDes.

## 2. **Direktur**

Dirktur BUMDes berkewajiban atas unit-unit usaha yang di bentuk sebagai berikut :

- Mengelola dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayana umum masyarakat desa.
- Menggali dan Memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- Melakukan kerja sama dengan Lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes.
- Menyiapkan rencana kenerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap tahun.
- Menyelenggarakan ademistrasi umum dan keuangan BUMdes.
- Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan komisaris.
- Menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga.
- Mengusulkan unit usaha baru yang layak di kembangkan sesuai dengan potensi desa.

Adapun wewenang Dirktur BUMDes atas unit-unit usaha yang di bentuk sebagai berikut :

- Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
- Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
- Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa Sekurang-kurangnya 2 ( dua ) kali dalam 1 ( Satu ) tahun.
- Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban tahunan BUMdes melalui musyawarah desa selambat lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah tutup buku tahunan ( LPJ BUMdes ).

**3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Petugas Pengawasan Umum**

Ketua BPD atau Petugas Pengawasan Umum bertugas dan berkewajiban:

- Bersama pendamping desa dan pemerintah desa/kelurahan memberikan informasi tentang kegiatan PPD kepada masyarakat desa/kelurahan.
- Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan PPD, evaluasi sasaran program serta pemanfaatannya.
- Memastikan penyaluran dana usaha Desa/Kelurahan telah memenuhi syarat dan ketentuan program yang berlaku.

- Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- Mendorong masyarakat pemanfaat/peminjam bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan, sehingga pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan baik.
- Bersama Kepala Desa/Lurah dan pelaku PPD lainnya menyampaikan hasil musyawarah desa/kelurahan, khususnya kegiatan bidang sektoral kepada kecamatan dan kabupaten/kota.
- Mengikuti pelaksanaan kegiatan PPD pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian/perguliran, khususnya dalam pertemuan-pertemuan desa.
- Mendatangi Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).

#### 4. LPM / LKMD/K

Ketua LPM/LKMD/K bertugas dan berkewajiban:

- Bersama pendamping desa dengan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada, memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- Membantu Kades/Lurah melaksanakan pertemuan bersama pendamping desa dengan Kepala Dusun dan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang Dana Usaha Desa/Kelurahan.

- Bersama pendamping desa dan Pengelola UED/K-SP mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat serta merumuskannya menjadi draft usulan.
- Dibantu pendamping desa, menyiapkan usulan, termasuk rencana biaya untuk diajukan ke MUSRENBANG kecamatan dan MUSRENBANG kabupaten/kota. LPM/LKMD/K harus menyimpan satu salinan asli (copy) dari setiap usulan yang diajukan ke MUSRENBANGDES
- Bersama kelompok masyarakat serta pendamping desa mengatur persiapan pelaksanaan kegiatan.
- Ketua LPM/LKMD/K menandatangani speciment pada rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan.

#### **5. Pemegang Otoritas Rekening DUD/K**

Secara umum tugas dan tanggung jawab pemegang otoritas adalah :

- Membuka rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- Menandatangani dokumen SPB dan dukumen yang dikeluarkan oleh BRI.
- Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan UED/K-SP.
- Menghadiri rapat internal PPD di desa.
- Memfasilitasi dalam penanganan masalah.

## 6. Pengelola UED/K-SP

Secara Umum Tugas dan Tanggung jawab Pengelola UED/K-SP adalah:

- Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa/kelurahan.
- Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- Mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan serta dana simpan pinjam masyarakat.
- Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- Pengelola UED/K-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin selanjutnya diberikan pinjaman.
- Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.

Pengelola UED/K-SP terdiri dari minimal 4 Orang yaitu, Ketua, Kasir, Tata Usaha dan Staf Analisis Kredit dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

a) Ketua UED/K-SP

Ketua UED/K-SP mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

- Memimpin organisasi UED/K-SP.
- Memberikan pinjaman yang diajukan calon pemanfaat kepada UED/K-SP berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa/Kelurahan II/Perguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
- Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana UED/K-SP.
- Mengawasi perputaran dana UED/K-SP.
- Mengangkat tenaga Administrasi bila dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan UED/K-SP.
- Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan serta Pendamping Desa.
- Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa/Kelurahan, BPD, Lembaga kemasyarakatan, Pendamping Desa, Koordinator Daerah, Kader Pembangunan Masyarakat serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.

- Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga UED/K-SP.
- Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat.
- Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada masyarakat.
- Menandatangani spesimen rekening UED/K-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk.
- Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan difasilitasi oleh Pendamping Desa
- Melaksanakan Pertanggungjawaban tahunan melalui “Musyawarah Desa / Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan” (MD/KPT/MKPT).
- Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana UED/K-SP sesuai aturan Pedum dan Juknis serta aturan yang berlaku.
- Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.

b ). Kasir UED/K-SP

Kasir UED/K-SP mempunyai Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut:

- Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
- Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UED/K-SP.

- Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UED/K-SP secara periodic tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan.
- Menandatangani spesiment rekening UED/K-SP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk.
- Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- Bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank.
- Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.

c ). Tata Usaha UED/K-SP

Tata Usaha mempunyai Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut:

- Berfungsi sebagai Sekretaris.
- Membantu dibidang keuangan.
- Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Desa.
- Membantu dibidang administrasi umum UED/K-SP.
- Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan pada papan informasi secara rutin dan mutakhir.

- Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada Ketua UED/K.
- Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa/Kelurahan difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- Bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UED/K-SP serta administrasi lainnya.

d). Staf Analisis Kredit

Staf Analisis Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UED/K-SP.
- Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
  - Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha);
  - Cek fisik kelayakan agunan;
- Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon pemanfaat),
- Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.

- Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
- Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
- Melakukan umpan balik pada calon peminjam.
- Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari Otoritas DUD, Kader Pembangunan Masyarakat, Pengawas Umum, Pengelola UED/K-SP dan Pendamping Desa.

#### **7. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)**

Kader Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mensosialisasikan program Dana Usaha Desa/Kelurahan kepada semua masyarakat desa/kelurahan khususnya dalam tahap penyiapan masyarakat.
- Membantu Pendamping Desa dan pelaku lainnya di Desa/Kelurahan melakukan identifikasi potensi desa/kelurahan dan penggalian gagasan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh Pendamping Desa.
- Bersama Pendamping Desa melakukan fasilitasi terhadap forum Musyawarah Desa/Kelurahan.
- Bersama Pendamping Desa mengembangkan kapasitas masyarakat desa/kelurahan dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan, organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi pembentukan Pengelola UED/K-SP.

- Bersama Pendamping Desa dalam menyusun rencana pembangunan desa/kelurahan, program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- Bersama Pendamping Desa melakukan fasilitasi kepada masyarakat dalam pengajuan usulan kegiatan.
- Bersama Pendamping Desa membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh Staf Analisis Kredit.
- Bersama Pendamping Desa membantu Pengelola UED/K-SP dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi.
- Bersama Pendamping Desa memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah yang ada di desa/kelurahan dan mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk pemecahan masalah.
- Bersama Pendamping Desa membantu menyiapkan gagasan keningkat desa/kelurahan (Musrenbang).
- Bersama Pendamping Desa memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- Bersama Pendamping Desa memfasilitasi masyarakat untuk pembinaan pasca program, kelestarian dan pengembangan tindaklanjut kegiatan.
- Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaporan kegiatan PPD.
- Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Program atau pihak lainnya.

- Membuat laporan kegiatan secara berkala (bulanan) tepat waktu dan disampaikan kepada Pendamping Desa dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa.

## 4.2 PEMBAHASAN

Dalam hasil penelitian ini membahas Evaluasi BUMdes Dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Al-Mukamil Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis , yaitu:

### 4.2.1 Evaluasi BUMdes Dalam Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis “

Adapun dalam evaluasi pengelolaan usaha-usaha yang telah dibentuk melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku maka yang menjadikan ukuran dalam suatu evaluasi pengelolaan unit usaha yang ada apakah efektif, cukup efektif atau kurang efektifnya di Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) dapat dilihat sesuai dengan indikator yang di kemukakan oleh William N Dunn<sup>57</sup> menunjuk enam Indikator yang penting dalam mengevaluasikan didalam pengelolaan diantaranya ,Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan.

---

<sup>57</sup> Dunn, N. William.2001.Pengantar Analisis Kebijakan Public, Jakarta : Gadjah Mada University Press

## 1. Efektifitas

Efektifitas yaitu apakah hasil yang di inginkan tercapai. didalam pelaksanaan pengelolaan UED-SP Desa Puteri Sembilan yang sebagai mana telah ditetapkan apakah evaluasi ini mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa Puteri Sembilan. Efektifitas berkaitan dengan berberapa usaha BUMDes dalam mencapai tujuan evaluasi BUMdes dalam pengelolaan UED-SP salah satunya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( PADEes ) .

Efektifitas memiliki arti hasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari Efektif adalah Efektivitas. Menurut Effendy<sup>58</sup> mendefinisikan efektifitas sebagai berikut : komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang di rencanakan sesuai dengan biaya yang di anggarkan, waktu yang telah di tetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” ( Effendy )<sup>59</sup> . Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indicator Efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.

Menurut Hadayaningrat<sup>60</sup> Efektifitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya adalah Efektif , jadi Kalau sasaran atau tujuan itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ,maka perkerjaan itu tidak Efektif .

<sup>58</sup> Effendy, Onong. Uchjana. 1989. Kamus komunikasi. Bandung: Bandar maju.

<sup>59</sup> Ibid, hal 14

<sup>60</sup> Handayaningrat, Soewarno. 1998. Sistem birokrasi pemerintahan. Jakarta: Gunung

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran berupa jauh target dapat tercapai, pengertian Efektifitas ini lebih berorientasi pada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. James I Gibson mengatakan Efektifitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas.<sup>61</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, maka secara singkat pengertian dari pada efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat sasaran “ *doing the ring things* “ tingkat efektivitas itu sendiri dapat di tentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Dari yang dikemukakan di atas maka ukuran efektivitas organisasi merupakan satu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi,Program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Dari pembahasan diatas ukuran efektivitas bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa Kriteria akhir. Menurut pendapat Rachand M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran efektivitas sebagai berikut :

1. Kualitas artinya Kualitas yang di asilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya Kualitas dari jasa yang di asilkan

---

<sup>61</sup> James I Gibson. 1996 Organisasi, alih Bahasa Ir.Nunuk Ardiana, MM, Jakarta Bina Aksara Hal 27

3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian satu tugas khusus dengan baik.
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalu
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya berkerja sama dengan baik , berkomunikasi dan mengkoordinasikan

12. Keluwesan adaptasi artinay adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan likungan ; ( Steers ).<sup>62</sup>

Hal di atas yang di kemukakan, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan di capai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Dari hasil wawancara dengan informen penelitian yaitu Pj Kades Desa Puteri Sembilan Bapak Panut,Spd penulis menanyakan “ upaya apa yang di lakukan oleh Kades selaku komisariss untuk meningkat ekomomi masyarakat ? beliau mengatakan

*“ Upaya saya selaku komisariss terhadap pengelola UED-SP diantara memberi saran kepada pengelola untuk memberikan pinjaman modal kepada masyarakat desa,agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa.”*<sup>63</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh Direktur BUMdes yaitu Bapak Syairul, S.pd Desa Puteri Sembilan beliau mengatakan :

*“ Upaya Saya Sebagai Direktur BUMDes untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan membuka unit usaha-usaha di desa,dengan hal itu tersebut membuka lapangan perkerjan di desa, dan menurukan angka kemiskinan di Desa Puteri Sembilan.”*<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Steers, M Richard. (1985). Efektifitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga. Hal 46-48

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kades Desa Puteri Sembilan Bapak Panut S.Pd, Selaku Komisariss untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Direktur BUMdes Desa Puteri Sembilan Bapak Syairul,S.Pd

Penjelasan diatas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara Efektif juga perlu adanya homonisasi kemampuan sumberdaya dengan menggunakan sasaran lain sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas.

Setiap pekerjaan pegawai dalam organisasi sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah di rencanakan terlebih dahulu. Untuk itu faktor ke efektifannya banyak mempengaruhi kepada pengelola dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang . Tingkat pencapaian tujuan pengelola dalam suatu organisasi dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka hal-hal yang mempengaruhi efektifitas adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan hasil dan kecepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan/atau program tersebut di samping itu evaluasi apabila terjadi kesalahan pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akan tercapai suatu keseimbangan

Hal yang di jelaskan di atas maka ukuran efektivitas merupakan satu standar akan terpenuhi mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas ukuran dari pada efektivitas harus adanya berbandingana anatara input dan output, ukuran dari pada efektifitas mesti adanya tingkatan kepuasan dan adanya pencitaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Dari hasil pengamatan penelitian dilapangan bahwa UED-SP Desa Puteri Sembilan Banyak terjadinya penunggakan ini di akibatkan dari penurunan harga karet dan sawit dan juga unit unit usaha yang di bentuk oleh BUNdes belum terealisasi diantara nya Unit LPG, unit dagang kantin, unit penyewaan pengakutan barang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informen kunci yaitu: Bapak Syairul,Spd Selaku Direktur Bumdes Desa Puteri Sembilan penulis bertanya “ apakah sudah bertambah usaha-usaha masyarakat yang ada Desa Puteri Sembilan ?” beliau mengatakan :

*“Dari BUMdes sudah kami membentuk unit usaha yang ada berdasar kan potensi desa di antaranya Unit simpan pinjam, kantin, penyewaan barang sehingga tujuan dari BUMdes tercapai untuk mendapatkan Pades tercapai dan tepat guna bermanfaat terhadap masyarakat Desa.”<sup>65</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Syahrudin Ketua BPD selaku Pengawas Desa Puteri Sembilan .”beliau mengatakan :

*“Usaha-usaha yang BUMdes bentuk sudah memadai namun saat sekrang ini pengelola di unit yang dibentuk belum maxsimal dibidang unit usahanya sehingga untuk mendapatkan Pendapatan Asli Desa menjadi terkendala,”<sup>66</sup>*

wawancara selanjtnya sama Bapak Saharudin selaku ketua UED-SP Desa Puteri Sembialn menanyakan “ Apakah turun angka kemiskinan Desa Puteri Sembilan.?” Beliau mengatakan :

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Bapak Syairul,S.Pd Selaku Direktur BUMDes Puteri Sembilan

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Syahrudin Selaku Ketua BPD Selaku Pengawas Desa Puteri Sembilan.

*“Pengelola UED-SP berupayan untuk melakukan yang terbaik di unit UED-SP diantaranya memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, sehingga menurunkan angka kemiskinan di desa.”<sup>67</sup>*

Untuk penilaian 3 indikator ini Efektivitas dalam melaksanakan Perbub Nomor : 38 tahun 2014 tentang pemahaman peminjamna di Unit Usaha Simpan pinjam.

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa evaluasi yang di lakukan oleh BUMdes dalam pengelolaan UED-SP sudah berjalan dan memberi dampak perekonomian bagi masyarakat Desa Puteri Sembilan. Hal ini sangat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan ekonomi masyrakat di desa.

Dari hasil penelitaian dilapangan penulis dapat di kesimpulan bahwa hasil dari indikator Efektifitas terhadap Evaluasi BUMdes dalam pengelolaan UED-SP Desa Puteri Sembilan kurang efektif dimana pihak pengelola UES-SP dalam mencari anggota UED-SP maupun di unit yang lain tidak berdasarkan keahlian, dari hasil dari wawancara dengan informen tujuan dari efektifitas tersebut tidak tercapai.

## **2. Efisiensi**

Efisiensi adalah seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, dalam hal ini Pendapatan Asli Desa ( PAdes ) lalui BUMdes dalam mevaluasikan pengelolaan di UED-SP Desa Puteri Sembilan, adapun tujuan dibentuknya BUMdes oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah untuk

---

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Bapak Saharudin Selaku Ketua Unit UED-SP

mendapatkan Pendapatan Asli Desa ( PAdes ) sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, UED-SP mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapaikan target dalam mendapatkan Asli Desa. Komisaris, BPD adalah pengawasan dalam sebuah manajemen organisasi UED-SP anggota pengelola sangat tergantung pada sumber daya manusia kemauan dan kemampuan birokrasi di unit usaha yang telah di bentuk.

Efisiensi Menurut, Prajud Admosudiharjo Menyatakan apabila kita berbicara tentang efisiensi kita membayangkan hal penggunaan sumber daya ( *Resources* ) kita secara optimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>68</sup> Berdasarkan pendapat diatas, bahwa efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumberdaya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Berdasarkan pernyataan di atas pengukuran efisiensi digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja pengelola di sektor publik. Sehingga dapat diketahui seberapa efisien pemanfaatan sumber daya yang ada dengan hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara kepada salah satu informen penelitian yaitu Bapak Kamizan, S.Si sebagai Pendamping UED-SP Desa Puteri Sembilan penulis menanyakan “menurut pendapat bapak apakah tahapan-tahapan peminjan sudah sesuai dengan persyaratan yang telah diajukan UED-SP ?.

*“Tahapan-tahapan pinjam yang pengelola UED-SP terhadap masyarakat yang meminjam sudah cukup baik, dimana persyaratannya*

---

<sup>68</sup> Atmosudirdjo, Prajudi. 1986. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.

*sesuai dengan perbug kabupaten bengkalis namun yang menjadi kendalanya dana untuk pergulirannya tidak mencukupi.*<sup>69</sup>

Dalam hal di atas partisipasi masyarakat dalam pinjaman diharapkan agar dapat bergulirnya pembayaran terhadap peminjaman sebagai untuk meningkatnya pendapatan Asli Desa dan untuk meningkatnya perekonomian masyarakat ,kerja sama antara komisaris, Direktur ,pendamping desa,pengawasan dari BPD Maupun masyarakat,Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa banyak pemanfat UED-SP pembayarannya tidak tepat waktu pergulirannya . Asumsi penulis dari hasil wawancara dimana pertanyaan ditujukan Pendamping UED-SP Desa Puteri Sembilan beliau menyatakan “ lesunya pengelola UED-SP terhadap pemugutan peminjam pemanfaat dikibatkan lemahnya Efektif. sehingga kami dalam menjalankan tidak tercapai.hal ini menunjuk lemahnya efektif pengelola terhadap pemanfaat yang meminjam di UED-SP.

Salah satu sumber daya terpenting dalam manajemen adalah sumber daya manusia atau *Human Resource* . petingnya sumberdaya manusia perlu di sadari oleh semua tingkat manajemen,bagaimana majunya teknologi saat ini namun factor manusia tetap memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu organiassi. Menurut Zainun manajemen sumberdaya manusia merupakan bagian yang penting bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu manajemen sumber daya manusia adalah indentik dengan manajenan itu sendiri .<sup>70</sup>

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni atau proses mempengaruhi, memajukan atau mengembangkan,dan memelihara sumber daya

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Pendamping Kamizan,S.si Desa Puteri Sembilan

<sup>70</sup> Wawancara dengan Direktur BUMDes (Kamis, 29 Desember 2019)

manusia yang kompeten sedemikian rupa, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UED-SP Desa Puteri Sembilan Saharudin penulis menanyakan “ Apakah ada Upaya masyarakat untuk meminimalisir tunggakan yang menggunakan Program UED-SP Al-Mukamil ?”

*“Upaya pihak pengelola UED-SP untuk meminimalisirkan penunggakan masyarakat yang meminjam diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat membayar tepat waktu, sehingga perguliran berjalan dengan baik.”<sup>71</sup>*

Sumberdaya manusia ( SDM ) yang ada didalam suatu organisasi perlu di kembangkan sampai pada tahap tertentu sesuai dengan perkembangan dalam suatu organisasi. Apabila Organisasi ini berkembang sesuai dengan perkembangan sumberdaya manusia. perkembangan sumberdaya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan non formal yang berkesinambungan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk pengembangan Sumberdaya manusia ( SDM ) terutama dalam hal pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian, pendidikan pada umumnya sangat berkaitan erat tenaga ahli yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan perkerja yang sudah menduduki suatu jabatan di dalam suatu organisasi.

Untuk penilai kinerja di Unit Usaha Simpan Pinjam dalam merealisasikan pegembalian peminjam untuk tahun 2019 dapat dikatakan belum maksimal, diketahui diunit UED-SP. banyak sekali penunggakan yang terjadi, ini bukan alasan

<sup>71</sup> Wawancara dengan ketua UED-SP Desa Puteri Sembilan

menghambat pemungutan pinjaman melainkan dikarenakan harga perkebunan menurun. Berdasarkan hasil pengamatan penulis rata-rata untuk Kabupaten Bengkalis hal UED-SP rata-rata banyak masalah di antaranya banyaknya penungakan yang terjadi.

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta analisa hasilnya. kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.<sup>72</sup>

Sedangkan Nawawi mengatakan bahwa “kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/material maupun non fisik/non material.”<sup>73</sup> Menurut Simanjuntak “ Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu”.<sup>74</sup> Foster dan Seeker<sup>75</sup> Menyatakan bahwa “ kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerja yang bersangkutan “

Dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Puteri Sembilan yaitu Bapak Samsul “Apakah sudah ada inovasi dalam Adesmistansi pelayanan pengelola UED-SP terhadap masyarakat ?” menurut yang saya lihat dilapangan

<sup>72</sup> Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 201

<sup>73</sup> Nawawi, Hadari. 2004. Meningkatkan Mutu Pembelajaran disekolah. Makalah. Semarang. Depdiknas

<sup>74</sup> Simanjuntak, Payaman j. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: FE UI.

<sup>75</sup> Foster, Bill, dan Keren R. Seeker. 2001. Pembinaan untuk meningkatkan kinerja Karyawan. Penerjemah: Ramlan. Jakarta: PPM

sudah saya ungkapkan sebelumnya bahwa untuk tenaga atau petugas dalam pelayanan Adesministrasi pengelola dengan peminjam Sangat baik,Namum Pada saat ini UED-SP banyaknya terjadi penungakan yang begitu banyak, ini dikarenakan faktor-faktor pendapatan penghasilan dalam masyarakat desa menurun yaitu hasil kebun harga jual rendah.”<sup>76</sup>

Keberhasilan sutu organisasi di pengaruhi oleh kinerja ( *JobPerformance* ) sumberdaya manusia, untuk itu setiap organisasi baik pemerintahan maupun swasta akan berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapaikan tujuan organisasi yang telah di tetapkan. budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi kearah perkembangan yang lebih baik,disisi lain,kemampuan pemimpin dalam menggerakkan dan memberdayakan pegawainya akan mempengaruhi kinerja. istilah kinerja dari kata *job performance* atau *actual performance* ( Prestasi kerja atau pertasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang ) Prestasi kerja pada umumnya di pengaruhi oleh kecakapan,keterampilan,pengalaman dan kesungguhan dari tenaga kerja yang bersangkutan,

Dari hasil pengamatan penelitian langsung dilapangan dapat di simpulkan pada indikator efesensi di UED-SP pada saat ini tidak mencapai tujuan yang di inginkan atau kurang baik, di karenakan kinerja pengelola UED-SP tidak maksimal .

---

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat Yaitu Bapak Samsul

### 3. Kecukupan

Kecukupan dapat juga ditafsirkan dan diartikan berbeda-beda oleh setiap orang sesuai dengan tempat dan situasi sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, Namun ditinjau dari aspek taksonomi kecukupan sesuai dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan masyarakat desa yang dibutuhkan, nilai atau kesempatan akan adanya masalah. kriteria kecukupan menitik beratkan hubungan antara artinatif kebijakan dan keberhasilan yang diharapkan.

Pengertian kecukupan dalam dalam evaluasi BUMDes dalam pengelolaan UED-SP dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam kecukupan masyarakat desa dalam menjawab persoalan dilapangan. berdasarkan penelitian mengenai evaluasi BUMdes dalam pengelolaan UED-SP yang dilihat dalam indikator kecukupan bahwa dalam pengelola UED-SP masih belum dirasakan kebanyakan masyarakat desa.namun hanya segelintir masyarakat yang memang sudah merasakan, dilihat dari segi perubahan,bahwa evaluasi BUMdes ini memberikan perubahan.dimana sikap masyarakat desa yang selama ini hanya berharap pada bantuan pemerintah daerah selama ini berubah menjadi masyarakat yang lebih proaktif dalam mengakses pergulirkan dalam program UED-SP Desa Puteri Sembilan.

Menurut William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,

nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Dunn<sup>77</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini, menurut Dunn, (2003:430-431) dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

1. Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
2. Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
3. Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
4. Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

---

<sup>77</sup> Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Dari hal yang dikemukakan di atas maka ukuran indikator kecukupan merupakan suatu standar akan kepuasan masyarakat akan tercapai serta menunjukkan pada tingkat sejauh mana pengelola melaksanakan fungsi-fungsinya. dalam penelitian ini adalah Evaluasi BUMdes tentang pengelolaan UED-SP Desa Puteri Sembilan dari keterangan di atas tanggapan salah satu responden terhadap indikator kecukupana yaitu Bapak Direktur BUMDEs yaitu Bapak Syairul,S.pd penulis menanyakan “kebijakan apa saja oleh BUMdes untuk UED-SP Al-Mukamil dalam menghadapi tunggakan.? Beliau menjawab.?

*“Kebijakan BUMdes untuk UED-SP dalam menghadapi tunggakan terhadap masyarakat diantara pengelola mendatangi Rumah-kerumah peminjam untuk bertanya langsung kepada manfaat UED-SP”<sup>78</sup>*

Hal yang sama juga penulis menanyakan dengan ketua UED-SP Desa Puteri Sembilan,beliau menjawab

*“Kebijakan BUMdes di unit UED-SP perlu waktu yang cukup untuk menangani angka tunggakan tinggi,hal tersebut berpengaruh terhadap pengembalian bergulir dengan masyarakat desa,dan pembayaran tepat waktu,sehingga dapat di rasakan kesemua masyarakat.”<sup>79</sup>*

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat diketahui secara umum tanggapan responden terhadap indicator kecukupan kurang dikarenakan banyaknya angka penunggakan,dana hiba yang kurang dari Pemkab Bengkalis. kategori indikator hasil tanggapan responden kurang baik.

<sup>78</sup> Wawan cara dengan bapak Syairul,S.pd selaku Direktur BUMDEs Puteri Sembilan

<sup>79</sup> Wawan cara dengan bapak saharudin ketua UED-SP Desa Puteri Sembilan

Wawancara selanjutnya ditujukan kepada responden Pendamping Desa Puteri Sembilan penulis menanyakan “Apakah Sudah ada laporan keuangan oleh pengelola UED- SP AL- Mukamil kepada kepala Desa Puteri Sembilan.?”

*“laporan keuangan pengelola UED-SP kepada pemerintahan Desa sudah ada, namun waktu laporannya pada akhir tahun atau pada tutup buku laporan dikerjakan bersama-sama dengan pendamping desa.”<sup>80</sup>*

Dari hasil wawancara diatas bahwa pendamping sangat diperlukan untuk menjadi unit usaha UED-SP yang baik dan kerja sama antara UED-SP sama pemerintah desa.

wawancara selanjutnya dengan responden ketua UED-SP, penulis menanyakan “ Apakah sudah bagus Komunikasi pengelola terhadap masyarakat yang ingin merasakan program ini .”?

*“ Komunikasi antara pengelola UED-SP dengan masyarakat pemanfaat sangat baik, diantaranya pemberitahuai persyaratan pinjaman kepada masyarakat yang ingin meminjam kepada UED-SP.”<sup>81</sup>*

Hasil pengamat penulis dilapangan dan hasil dari wawancara dengan responden terhadap indikator kecukupan maka penulis dapat buat kesimpulan bahwa kecukup dalam mengambil kebijakan di UED-SP Desa Puteri Sembilan tidak tercapai dengan baik dimana kebijakan untuk mengurangi angka penunggakan pada UED-SP belum tercapai .

#### **4. Pemerataan**

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik. Berdasarkan di lapangan oleh peneliti terkait dengan pemerataan yang dilakukan sudah adil dan

<sup>80</sup> Wawan cara dengan bapak Kamizan,S.si pendamping Desa Puteri Sembilan

<sup>81</sup> Wawan cara dengan bapak saharudin ketua UED-SP Desa Puteri Sembilan

sesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat Desa. Bagi Masyarakat penerima Manfaat simpan pinjam.

Dunn Menyatakan bahwa kriteria kesamaan ( equity ) Erat berhubungan dengan rasionalisasi legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berberda dalam masyarakat.<sup>82</sup> kebijakan berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil disterbusiannya. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif,efesien dan mencukupi apabila biaya pemanfaat merata . kunci pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Pendapat dari ahli yang sama menyatakan untuk membuat rekomendasi di sektor publik analisis biaya manfaat mempunyai beberapa ciri khusus sebagai berikut :

1. Analisis biaya-manfaat berusaha untuk mengukur semua biaya dan manfaat untuk masyarakat yang kemungkinan dihasilkan dari program pulik, termasuk berbagai hal yang tidak terlihat yang tidak mudah untuk diukur biaya dan manfaatnya dalam bentuk uang.
2. Analisis biaya-manfaat secara tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi,kerena kriteria sebagian besar ditentukan dengan penggunaan efesiensi ekonomi secara global. Suatu kebijakan atau program dikatakan efesien jika manfaat bersih ( yaitu total manfaat dikurangi dengan total biaya ) adalah lebih besar dari pada nol dan lebih tinggi

---

<sup>82</sup> Loc, Cit Dunn Pengantar Analisis Kebijakan.....Hal 343

dari manfaat bersih yang memungkinkan dapat dihasilkan dari jumlah alternative investasi lainnya di sektor swasta dan public.

3. Analisis biaya-manfaat secara tradisional menggunakan pasar swasta sebagai titik tolak didalam memberikan rekomendasi program public .hanya kemungkinan dari suatu investasi public selalu dihitung berdasarkan pada manfaat bersih apa yang mungkin dapat di peroleh dengan menginvestasikannya di sektor swasta.
4. Analisis biaya-manfaat kontemporer, sering di sebut analisa biaya-manfaat sosial dapat juga digunakan untuk mengukur pendistribusian kembali manfaat karena analisa biaya-manfaat menekankan kriteria keadilan ,analisis ini konsisten dengan nasionalitas sosial<sup>83</sup>

Ciri yang keempat yaitu analisa biaya-manfaat kontemporer termasuk pada kriteria pemerataan karena didasarkan pada keadilan atau kewajaran, sehingga ciri tersebut dapat di gunakan untuk mengukur pemungutan distribusi yang merata pada kelompok-kelompok yang berbeda, Dunn pun menjelaskan bahwa Analisis biaya manfaat kontemporer juga mempunyai beberapa keterbatasan.

1. Tekanan yang terlalu eksklusif pada efisiensi ekonomi yang dapat berarti bahwa kriteria keadilan menjadi tidak berakti dan tidak dapat di terapkan.
2. Nilai uang tidak cukup untuk mengukur daya tanggap ( *Reponsiveness* ), disebabkan adanya variasi pendapatan antara masyarakat .

---

<sup>83</sup> Loc,Cit Dunn.....Hal.449

3. Ketika harga pasar tidak ada bagi suatu barang yang penting, analisis sering memaksa diri untuk membuat harga bayangan ( *Shadow Price* ), yaitu estimasi subyektif tentang harga-harga dimana warga Negara mempunyai keinginan untuk membayarkan terhadap barang dan jasa tertentu.

Keterbatasan tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan biaya-manfaat terkadang jarang memecahkan masalah atau konflik antara efisiensi dan keadilan . serta status sosial masyarakat yang berbeda-beda yaitu antara kebutuhan dengan pendapatan setiap orang menjadikan pendapatan bukanlah ukuran yang cukup memadai untuk mengukur kepuasan individu. Menggunakan analisis biaya dan manfaat terdapat beberapa cara dalam mengklasifikasikan biaya dan manfaat yang telah penulis simpulkan yaitu:

1. Biaya dan manfaat di dalam Vs diluar di sini pertanyaannya adalah apakah biaya atau manfaat yang di keluarkan adalah bersifat *Internal* atau *Eksternal* untuk suatu jenis kelompok sasaran atau wilayah hukum.
2. Biaya dan manfaat yang diukur secara langsung dan tidak langsung. Pertanyaan disini adalah apakah biaya atau manfaat adalah nya ( *tangible* ) atau tidak nyata ( *Intangible* ) yang nyata adalah biaya dan manfaat yang secara langsung dapat diukur dengan harga pasar yang sebenarnya dari barang dan pelayanan. sementara yang tidak nyata adalah biaya dan manfaat yang secara tidak langsung diukur dengan cara menapsirkan nilai sebenarnya dari barang itu dengan patokan harga pasar.

3. Biaya dan manfaat primer dan skunder. disini pertanyaanya adalah apakah biaya atau manfaat itu di hasilkan secara lansung atau tidak langsung oleh suatu program, biaya atau manfaat primer adalah suatu biaya atau manfaat yang dihubungkan dengan sasaran program yang paling bernilai, sedangkan biaya atau manfaat skunder berkaitan dengan sasaran yang kurang bernilai.
4. Efenseinsi bersih Vs manfaat redistribusional di sini pertanyaannya adalah apakah kombinasi biaya dan manfaat membuat kenaikan dalam agregat pendapatan atau hama menghasilkan pendapatan atau sumberdaya di antara berbagai kelompok yang berbeda. Manfaat efisiensi bersih adalah manfaat yang mencerminkan kenaikan *riil* dari pendapatan bersih ( total biaya dikurang total manfaat ), sementara manfaat redistribusional adalah manfaat berupa pergeseran yang bersifat semua berupa pendapatan oleh suatu kelompok dengan konsekuensi pengorbanan ( pendapatan yang hilang ) dari kelompok lain tanpa menghasilkan peningkatan Efisiensi bersih.<sup>84</sup>

Dari jawaban keempat pertanyaan di atas dapat menghasikan berbagai jenis biaya dan manfaat. Jawaban pada suatu biaya atau manfaat yang bersifat di dalam kemungkinan diukur secara nyata atau tidak nyata. Terkadang biaya atau manfaat yang tidak nyata bersifat primer atau sekunder. Hal tersebut tergantung pada tingkat pentingnya terhadap sasaran-sasaran yang berbeda .jadi analisis biaya atau manfaat meskipun telah memperhitungkan restribusian dan keadilan sosial, sangat

---

<sup>84</sup> Dunn, Hal 450-454

terkait dengan pendapatan sebagai ukuran dari kepuasan ,oleh karena itu dapat di katakana sulit untuk mendiskusikan atau meneliti ketepatan setiap tujuan yang tidak dapat diekspresikan dalam hitungan uang atau angka.

Sosialisasi adalah suatu proses dimana anggota masyarakat baru mempelajari norma dan nilai masyarakat dimana dia menjadi anggota.<sup>85</sup> sedangkan menurut Anises S. Basalmah dalam mendefenisikan sosialisasi sebagai suatu proses dimana orang mempelajari sistem nilai,norma atau pola penilaian yang di harapkan oleh kelompok sebagai bentuk trasformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi anggota organisasi yang efektif .<sup>86</sup>

Pada dasarnya ,sosialisasi memberikan 2 ( Dua ) kontribusi fundamental bagi kehidupan kita,yaitu:

- a. Mamberikan unsur dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
- b. Memukinkan lestarnya suatu masyarakat suatu masyarakat karena sosialisasi akan hanaya ada suatu genarasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan merasa terganggu.

Dari pengertiana di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa sosialisasi Perbug tentang UED-SP merupaka suatu upaya dari Direktur BUMdes untuk memberikan pengertian ,informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan peminjam pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan UED-SP , dengan adanya sosialisasi tentang USP ini di

<sup>85</sup> Soejono Soekanto. "Sosiologi Suatu Pengantar", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal 65

<sup>86</sup> Anies S. Basalamah. "Perilaku Organisasi, Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora Dalam Organisasi", Edisi ke-3, Usaha Kami, Depok.2004. Hal 196

harapkan akan terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai peminjam dan memungkinkan lestarnya suatu kesadaran dan kepatuhan peminjam.

Dalam melakukan sosialisasi Simpan Pinjam perlunya adanya Startegis dan metode yang tepat yang dapat aplikasikan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan dalam buku karangana Azhari A. Samudra<sup>87</sup> Yaitu:

- a. Publikasi ( Publication ) adalah aktifitas Publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi setempat baik media cetak seperti surat kabar atau majalah, maupun media audio-visual seperti televisi atau Radio.
- b. Kegiatan ( Event ) adalah institusi Direktur BUMdes dapat melibatkan diri penyelenggara aktivitas tertentu yang di hubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan USP pada momen-momen tentu, misalnya: kegiatan olah raga, sponsor ,seminar atau kegiatan lainnya.
- c. Pemberitaan ( New ) adalah pemeritahuian dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif sehingga menjadi saran promosi yang efektif.
- d. Keterlibatan komunitas ( community invoement ); melibatkan komunitas yang pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan Pengelolaan UED-SP dengan masyarakat dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh setempat sebelum suatu pengelolaan UED-SP di buka.

---

<sup>87</sup> Azhari A.Samudra. "Tax Socialization", Indonesia Tax Review III, Edisi 41, 2004.

- e. Pencantuman identitas ( identity media ); berkaitan dengan pencantuman logo UED-SP pada berbagai media yang di tujukan sebagai saran promosi.
- f. Pendekatan pribadi ( lobbying) ; lobbying atau pendekatan pribadi yang dilakukan secara internal untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yaitu bapak Jumadi menanyakan Apakah pihak pengelola berpihak kepada masyarakat yang menggunakan program UED-SP.?

*“saya sebagai masyarakat desa Puteri Sembilan tidak keberpihak pengelola terhadap masyarakat yang ingin meminjam sangat susah banyak sekali persyaratannya dan pihak pengelola terhadap masyarakat yang ingin meminjam di UED-SP selalu keluarga pengelola yang di dahulukan.”<sup>88</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suwarno masyarakat Desa puteri Sembilan yang menggunakan program UED-SP, penulis menanyakan “Apakah ada kesenjangan oleh pengelola terhadap masyarakat yang menggunakan program UED-SP. ?

*“ banyak sekali kesenjangan-kesenjangan oleh pengelola terhadap masyarakat yang menggunakan program UED-SP,peminjam di antaranya bagi keluarga-keluarganya yang ingin meminjam dengan mudah dapat cair, sementara bagi kita yang tidaka ada hubungan keluarga dengan pengelola lambat cair dan menunggu antrian masyarakat yang ingin meminjam ke USP”<sup>89</sup>*

UED-SP ini merupakan Program unggulan Bupati Bapak Irian saleh, UED-SP kedepannya menjadi bank masyarakat di desa Sekaligus satu-satunya

<sup>88</sup> wawancara dengan bapak Jumadi selaku pemanfaat UED- SP

<sup>89</sup> Wawancara Dengan Bapak Suwarno selaku Pemanfaat Program UED-SP

Alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi Desa, Namun upaya tersebut harus memperhatikan kemampuan masyarakat desa yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemanfaat Bapak Latif penulis menanyakan “Apakah Pengelola UED-SP Desa Puteri Sembilan pernah mensosialisasikan tentang pemahaman Perbug Nomor : 38 Tahun 2014.?”

*“Pengelola UED-SP pernah Sosialisasi Perbug/meberikan penjelasan dengan masyarakat Desa yang ingin meminjam, peminjaman bergulir di UED-SP khususnya pemanfaat yang pertama meminjam”<sup>90</sup>*

Pelaksanaan UED-SP adalah suatu kebijakan bersifat pemerataan dalam arti semua masyarakat desa harus sama-sama dapat menikmati pelaksanaan UED-SP sesuai dengan tujuan pemerintah daerah yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan konsep pemerataan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis menarik kesimpulan tentang indikator pemerataan, dimana hasil penelitian lapangan banyak sekali ketidakeadilan-ketidakeadilan terhadap masyarakat desa dana yang di kelola oleh UED-SP tidak kesemuanya bisa di nikmati oleh masyarakat desa.

## 5. Responsivitas

Responsivitas adalah suatu hasil yang memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Adanya respon terhadap hasil kerja

---

<sup>90</sup> Wawancara Dengan Bapak Latif Sebagai Pemanfaat UED-SP.

merupakan hasil positif. apakah kerja Merupakan hasil positif kinerjanya memuaskan atau tidak dalam birokrasi adalah hal yang tidak memungkinkan sering terjadi, kemampuan atau upaya dalam merealisasikan target pinjaman yang tidak disarankan pada peletakan atau penempatan sumberdaya Manusia yang handal cenderung menjadi kendala kedalam perputara roda birokrasi. Konsekuensinya hasil yang hendak dicapai kurang memuaskan secara kolektif, karena sebuah organisasi sebuah organisasi mempunyai tujuan yang sama.

Menurut Dunn mengatakan bahwa responsivita (*responsiveness*). berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan , preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.<sup>91</sup> suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memperdiksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif bertujuan dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn mengemukakan bahwa :” kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya ( Efektifitas, Efisiensi Kecukupan dan kesamaan ) masih gagal jika belum menganggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Dengan kata lain responsivitas merupakan organisasi untuk mendefinisikan kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya kedalam berbagai program pelayanan. Bentuk responsivitas

---

<sup>91</sup> Loc.Cit Dunn, 2003. Hal 437

dengan menerima kritik dan saran oleh masyarakat khususnya peminjam untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pegembalian pinjam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu peminjam bapak Latif ( 35 Th ) penulis menanyakan “ Apa respon masyarakat kehadiran UED-SP di dalam masyarakat?. Beliau mengatakan :

*“ ya kehadiran UED-SP sangat bermanfaat dalam masyarakat namun pada saat ini pelayanan yang di berikan oleh pihak pengelola USP dimana pada saat itu pelayanan yang di berikan tidak maksimal, dalam arti pengurusan saya tidak mendapat respon kapan akan selesai”<sup>92</sup>*

Hasil yang berberda juga di sampaikan salah satu Informen penelitian yaitu bapak Jamal ( 45 Thn ) salah satu peminjam Desa Puteri Sembilan, beliau mengatakan :

*“ ya kehadiran UED-SP bermanfaat dalam masyarakat namun pelayan yang diberikan Pengelola UED-SP Desa Puteri Sembilan sudah baik sekali, masalah cepat lambatnya pengurusan itu saya tidak tahu, karena selama ini saya tidak pernah seperti itu mendapatkan pelayan yang lebih tidak baik “<sup>93</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan peminjan dengan Bapak Jumadi ( 47 Th ) penulis menanyakan “ menurut Bapak partipasi masyarakat terhadap UED-SP ?. beliau mengatakan :

*“ Partisipasi Masyarakat terhadap UED-SP, di antaranya membayar pengembalian peminjaman berguliran tepat waktu, sehingga mengurangi angka penungakan yang tinggi, dan banyak masyarakat yang dapat merasakan program UED-SP. “<sup>94</sup>*

<sup>92</sup> Wawancara Dengan Bapak Latif, Salah Satu Pemanfaat UED-SP

<sup>93</sup> Wawancara Dengan Bapak Jamal, Seorang Informan Penelitian

<sup>94</sup> Wawancara Dengan Bapak Jumadi, Salah Seorang Pemanfaat Program UED-SP.

Menurut penulis partisipasi masyarakat terhadap program UED-SP sangat penting dikarenakan pengembalian pinjaman, membayar tepat waktu dalam hal ini mengurangi angka penunggakan yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peminjam UED-SP Desa Puteri Sembilan Bapak Husin Penulis Menanyakan “ Menurut Pandangan bapak terhadap kelanjutan Program UED-SP ?. beliau mengatakan :

*“ kalau untuk melihat kelanjutan Program UED-SP pada saat ini sangat baik sekali,namun pada saat ini dana hiba dari pemda sangat tidak cukup untuk perguliran hanya 1 melliard dan kalau biasa di tambahkan lagi biar masyarakat bisa merasakannya.”<sup>95</sup>*

Untuk mengetahui responsivitas tentang Evaluasi BUMdes dalam pengelolaan UED-SP Desa Puteri Sembilan,dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa untuk dana hibah yang berasal dari pemda tidak cukup untuk perguliran di masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengembalian kurang baik sehingga terjadi angka penunggakan yang tinggi hal tersebut berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa dan dikategorikan kurang memuaskan.

## **6. Ketepatan**

Ketepatan yaitu Apakah hasil ( Tujuan ) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai,dalam konteks ini apakah upaya-upaya BUMdes untuk merealisasikan target dalam upaya meningkatkan pendapatan Asli Desa di desa Puteri Sembilan tepat sasaran, pada hakikatnya bukan mudah untuk mendapatkan hasil dari pada potensi di daerah itu sendiri, namun banyak hal yang terjadi di

---

<sup>95</sup> Wawancara Dengan Bapak Husin, Salah Seorang Pemanfaat Program UED-SP.

UED-SP yaitu temuan-temuan angka penunggakan yang sangat tinggi, hal tersebut dikarenakan harga disektor perkebunana menurun dan mengakibatkan turun angka pengembalian peminjam ini berhibas dengan tujuan dari pada di bentuknya BUMdes yakni untuk Pendapata Asli Desa rendah, dari hal tersebut kunci keberhasilan UED-SP Desa Puteri Sembialan kurang baik .

Dunn Mengatakan bahwa kelayakan ( *Appropriateness* ) adalah “ Kriteria yang dipakai untuk menseleksikan sejumlah alternatif untuk di jadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.kriteria kelayakan di hubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kritaria ini menyakut substasi tujuan bukan cara atau instrument untuk merialisasikan tujuan tersebut.”<sup>96</sup>

Arti ketepatan ini dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya ( bila ada ) misalnya dampak lain yang tidak mampu dipredeksi sebelumnya baik dapak tak terdua secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternative lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Di UED-SP salah satu sumber pendapatan/penerimaan desa yaitu Pendapata Asli Desa sesuai dengan potensi desa tersebut, penggunaan uang simpan pinjam oleh masyarakat di desa tidak tepat sasaran sehingga terjadilah masalah dalam UED-SP.

Jelas bahwa Evaluasi dalam pengelolaan terhadap UED-SP sangat domina dalam menjalani proses pengelolaan di unit usaha Simpan Pinjam. oleh karena itu

---

<sup>96</sup> Loc Cit. Dunn, 2003. Hal 499

tingkat pengembalian peminjam dalam pelaksanaan pemungutan yang di laksanakan turun kelapangan, ini merupakan syarat untuk mengurangi angka penungkan yang tinggi di dalam UED-SP, sehingga perguliran berjalan dengan baik serta kesejangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat Desa Puteri Sembilan berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Puteri Sembilan yaitu Bapak Panut, S.Pd selaku Komisaris penulis menanyakan “ Apa pendapat Bapak tentang kehadiran pemanfaat fektif-fektif dalam pengelola UED-SP?” beliau mengatakan :

*“pengelola UED-SP harus meverfikasikan secara ketat masyarakat yang ingin meminjam, berkoordinasi sesama tim verifikasi yang telah di SK kan yang jelas pemanfaat fekti-fekti merugikan masyarakat.”<sup>97</sup>*

Hal ini juga di sampaikan oleh pendamping desa bapak Kamizan, S.si pada saat wawancara penulis lakukan pada hari berikutnya, beliau mengatakan:

*“ untuk manfaat fektif-fektif di dalam pengelolaan UED-SP pada saat ini verifikasi harus dilakukan dengan ketat, Verifikasi berkas harus di lalu proses tahapan-tahapan seperti pendamping, komisaris, serta pengawas dimana banyak sekali yang terjadi penyewegan di UED-SP, ini membuat kerugian didalam masyarakat desa.”<sup>98</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ketua UED-SP yaitu bapak Saharudin penulis menanyakan “ Menurut pendapat Bapak tentang peroses penyitaan angguan terhadap penguasaan pemanfaat UED-SP yang menunggak ?

Beliau mengatakan:

<sup>97</sup> Wawancara Dengan Bapak Panut S.Pd, Selaku Komisaris

<sup>98</sup> Wawancara Dengan Pendamping Desa, Bapak Kamizan, S.si

*“ betul banyak penunggakan yang terjadi di UED-SP pemanfaat yang meminjam di karenakan tidak bisa membayar pegembalian bergulir di karenakan harga perkebunan menurun, adapun proses penyitaan anggunan selama ini belum pernah terjadi.”<sup>99</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapang bahwa sememangnya peroses penyitaan anggunan terhadap pemanfaat masih belum pernah terjadi namun persyaratan peminjam berupa angguna pemanfaat yang meminjam tetap ada dengan pengelola UED-SP. Hal tersebut di karenakan terbentur masalah dengan payung hukum tentang penyitaan anggunan belum ada, sehingga membuat angka penunggakan menjadi tinggi dan masih tetap banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Direktur Bumdes bapak Syairul,SPd penulis menanyakan: Apakah Proses kebijakan Verfikasi berkas masyarakat pemanfaat yang menggunakan program UED-SP Sesuai dengan peraturan peraturan Daerah.? Beliau Mengatakan :

*“untuk tahapan proses kebijakan Verfikasi berkas peminjam baru/ yang sudah pernah meminjam tetapi tetap ikuti dengan aturan yang berlaku seperti rapat dengan tim verifikasi, untuk mentukan pemanfaat yang lulus verifikasi “<sup>100</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketepatan dalam Evaluasi Bumdes di Unit UED-SP Desa Puteri Sembilan jawaban dari wawancara diatas dapat diasumsi bahwa peroses verifikasi berkas pinjaman pemanfaat yang bersifat di

<sup>99</sup> Wawancara Dengan Ketua Unit UED-SP Bapak Saharudin

<sup>100</sup> Wawancara Dengan Bapak Direktur BUMDes, Bapak Syairul.

dalam kemungkinan diukur secara nyata atau tidak nyata,terkadang Verfikasi berkas manfaat yang bersifat primer atau sekunder.

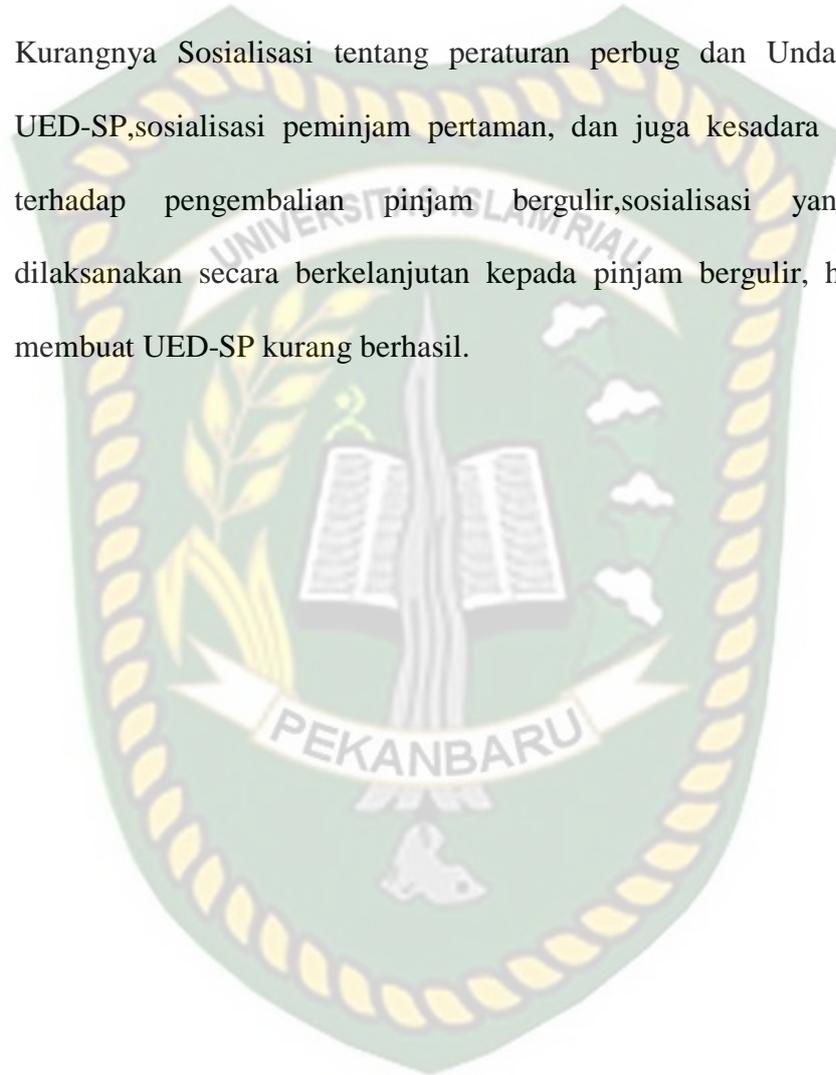
Dari hasil penelitaian dilapangan dapat ditari kesimpulan bahwa pada proses verfikasi terhadap pemanfaat yang lulus seleksi, sasaran-sasaran yang berbeda jadi ketepatan pemanfat untuk penambahan penerimaan pendapat PADdes UED-SP Desa Puteri Sembilan sebagai ukuran kepuasan dari ketepatan dari hasil tersebut dapat di katakana dari indicator responsivitas kurang memuaskan.

#### **4.2.2 Hambatan-Hambatan dalam Evaluasi BUMdes dalam pengelolaan UED-SP Al-Mukamil Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rumat Utara Kabupaten Bengkalis .**

Berdasarkan data peneliatan dan hasil dari analisa wawancara yang dilakukan informen peneliti yang menjadi hambatan dalam Evaluasi BUMdes dalam pengelolaan UED-SP Al-Mukamil Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rumat Utara yaitu :

1. Harga perkebunan menurun, hal ini berpergaruh terhadap pengembalian bergulir terhadap pemanfaat, membuat perguliran yang seterusnya menjadi terkendala, hal ini menjadi masalah di UED-SP sekarang ini. solusi BUMdes terhadap pengelola ( UED-SP ) yaitu pengelola mendatangi rumah-rumah pemanfaat untuk mencari jalan keluar agar tidak terjadi angka penungakan yang lebih banyak.

2. Hambatan-habatan dalam evaluasi BUMdes untuk ( UED-SP ) diantara turunnya harga karet dan sawet sehingga femanfaat tidak bisa membayar pergulir tepat waktu ,sehingga target tidak tercapai secara maksiamal.
3. Kurangnya Sosialisasi tentang peraturan perbug dan Undang-Undang UED-SP,sosialisasi peminjam pertaman, dan juga kesadara masyarakat terhadap pengembalian pinjam bergulir,sosialisasi yang kurang dilaksanakan secara berkelanjutan kepada pinjam bergulir, hal tersebut membuat UED-SP kurang berhasil.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V PENUTUP DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang dilihat, sebagai berikut :

*Pertama* : BUMDes Merupakan pimpinan yang membawahi ( UED-SP ) Unit-unit yang di bentuk sesuai dengan tujuan berdirinya BUMdes, sehingga tujuan BUMdes diantara mendapatkan hasil berdasarkan potensi Desa, Evaluasi Bumdes terhadap UED-SP salah Usaha untuk melihat sejauh mana peningkatan dan perubahan terhadap evaluasi BUMdes. Sehingga untuk angka penugakan terhadap Usaha Ekonomi Simpan Pijam ( UED-SP ), tidak lagi bermasalah terhadap pengembalian bergulirnya, sehingga Evaluasi BUMdes terhadap UED-SP untuk meningkatkan PADes Desa bisa tercapai, hal ini dibuktikan pada hasil wawancara dengan para informan, bahwa BUMdes sudah menjalankan Evaluasinya hanya saja masyarakat tidak memperdulikan pengembalian pinjam seperti masih banyaknya angka penunggakan di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ).

*Kedua* : Adapun faktor yang menyebabkan Evaluasi dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( USP-SP ) Al-Mukamil dalam masyarakat Desa Puteri Sembilan dikarenakan turunnya harga hasil dari karet dan sawit, selain itu penghambat dalam hal pelaksanaan Evaluasi BUMdes di antara kurang kerja sama atau koordinasi antara Direktur Bumdes, kepala desa dan masyarakat, kepala desa yang kurang bersosialisasi.

## B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas,dapat penulis memberikan saran-saran sehingga menjadi bahan pertimbangan pihak Pemerintah Desa Puteri Sembilan Serta BUMdesa dan Pengelola UED-SP Al-Mukamil, sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian diharapkan semua Masyarakat yang menggunakan program ini bisa berkerja sama, proaktif dalam demi tercapainya program yang baik dan sukses.
2. Pelaksanaan program UED-SP harus menghadirkan pilak lain untuk memberikan keterampilan kepada anggota UED-SP.
3. Direktur dan Kepala Desa harus memantau pelaksanaan UED-SP agar tepat sasaran dan tepat kegunaannya.
4. Pemerintah desa,BUMDES dan pengelola UED-SP Al-Mukamil harus lebih tegas lagi dalam menegakkan peraturan dalam pelaksanaan UED-SP, sehingga biasa berjalan sesuai dengan semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. 2000, *Menyusun rencana penelitaian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Arikunto, S. 2010. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),
- Azhari A. Samudra “ Socialization” Indonesia Tax Review III, Edisi 41 2004
- Arenawati, *Ademistrasi pemerintahan Daerah sejarah konsep dan penatalaksana di Indonesia* ( Yogyakarta : Grahailmu, 2014 )
- Dalam Hamdi, *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta, Yasrif Watam pone , 2002
- Effndy, Onong Uchjana 1989 *Kamus Komunikasi*, Bandung Bandar Maju.
- Foste, Bill, dan keren R. Seekker. 2001. *Pembinaan untuk meningkatkan kinerja Karyawan, penerjemah : Ramlan* Jakarta PPM
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Husni, H.S. 2010. *Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan*. Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhadam Labolo, *memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu kajian, Teori, Konsep dan pengembangannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal. 25
- Makhya, Syarief. 2004. *Ilmu Pemerintahan: Telaahan Awal (Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Muhaimin, suti'ah, dan sugeng listyo prabowo, 2009, *manajemen pendidikan*, jakarta: kencana.
- Mudasir, 2012, *Desain Pembelajaran, Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah*.
- Mardiahayati, 2012, *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter, Pekanbaru: Al-Mujtahadah*.
- Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa berbasis Modal Sosial, Perspektif Socio-legal*.
- Nugroho., Riant., 2009., *Public Policy.*, Yogyakarta: UGM Press

- Oey Liang. (2006 ). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rauf Rahyunir. *Asas penyelenggaraan pemerintahan Daerah* Zanafa Publishing. Nusamedia Yokyakarta , 2018
- Ryaasrasyid, *pemerintah yang amanah, Binarena Prawira*, Jakarta, 1998,
- Rosenthal dalam *Inu Kencana syafeidan Andi Azikin*, Perbandingan Pemerintah, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 7
- Soemendar, *dalam Inu Kencana Syafeidan Andi Azikin*, perbandingan Pemrintah ,Refika Aditama, Bandung, 2007,
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV
- Taliziduhu ,Ndraha, *Kybernologi beberapa konse Utama*, Sirao Credentia Center,Tangerang, Banten 2005,
- Taliziduhu, Ndraha, *Kybernologi Sebuah Scientific Movement*, Sirao Credentia Center, Tangerang ,Banten 2005,
- Taliziduhu, Ndraha, *Kybernologi sebuah profesi*, Sirao Credentia Center, tangkerang Banten,
- Wilson dalam *Inu Kencana Syafeidan AndiAzikin*, perbandingan pemerintah ,Refika Aditama, Bandung, 2007,
- Wirawan. 2012. *Evaluasi:Teori, Model, Standar, Aplikasi, danProfesi*. Depok PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. GAPS. Yogyakarta.
- William N. Dunn.2003 Pengatar.*Analisis Kebijakan Gadjah Mada Universitas* Press
- YusriMunaf 2016 . *Hukum Administrasi Negara*. Pekan BaruM arpoyanTujuh.

#### **Dokumentasi :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor .39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2015

Depertemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem bembangunan ( PKDSP ).2007



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau